

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2024**



KOTA BEKASI

**BADAN
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK KOTA
BEKASI**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat hidayahnya serta inayah-Nya kami masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 dapat tersusun sesuai jadwal. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini merupakan wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Daerah atas kinerja yang telah dicapai dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, baik sebagai evaluasi maupun parameter dalam meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

Sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024, kami akan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kinerja ke depannya. Kami berharap LKIP ini dapat memenuhi harapan seluruh *stakeholders* kota dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah di Kota Bekasi.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyusun LKIP ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan NKRI yang tercinta ini dan yang terakhir, kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, karenanya sumbang saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bekasi,

2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BEKASI,**



NESAN SUJANA S.T., M.T. CGCAE

Pembina Tk. I / (IV.b)

NIP. 19740708 200212 1 007

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat hidayahnya serta inayah-Nya kami masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 dapat tersusun sesuai jadwal. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini merupakan wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Daerah atas kinerja yang telah dicapai dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, baik sebagai evaluasi maupun parameter dalam meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

Sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024, kami akan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kinerja ke depannya. Kami berharap LKIP ini dapat memenuhi harapan seluruh *stakeholders* kota dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah di Kota Bekasi.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyusun LKIP ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan NKRI yang tercinta ini dan yang terakhir, kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, karenanya sumbang saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bekasi, 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BEKASI,**


NESAN SUJANA S.T., M.T. CGCAE

Pembina Tk. 1 / (IV.b)

NIP. 19740708 200212 1 007

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat hidayahnya serta inayah-Nya kami masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 dapat tersusun sesuai jadwal. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini merupakan wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Daerah atas kinerja yang telah dicapai dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, baik sebagai evaluasi maupun parameter dalam meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

Sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024, kami akan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kinerja ke depannya. Kami berharap LKIP ini dapat memenuhi harapan seluruh *stakeholders* kota dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah di Kota Bekasi.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyusun LKIP ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan NKRI yang tercinta ini dan yang terakhir, kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, karenanya sumbang saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bekasi,

2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BEKASI,**



NESAN SUJANA S.T., M.T. CGCAE

Pembina Tk. I / (IV.b)

NIP. 19740708 200212 1 007

IKTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 dimaksudkan untuk menginformasikan Capaian Kinerja tahun 2024 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada Penertapan/Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang merupakan bentuk komitmen penuh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi telah melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan membuat Rencana Strategis Teknokratik Tahun 2024-2026, Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, memiliki tugas untuk mewujudkan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, yaitu :

1. Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi;
2. Terwujudnya kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi.

Dalam kaitannya tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah membuat Penertapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis yang keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik. Capaian kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	MAKNA
1	Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Nilai AKIP Badan Kesbangpol	BB	BB	Target Tercapai

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	MAKNA
2	Terwujudnya kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi	Persentase Kasus SARA yang diselesaikan	100%	100%	Target Tercapai

Dari 2 (dua) sasaran strategis beserta sasaran indikatornya, seluruh target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Keberhasilan ini didukung oleh tersedianya APBD untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2024, Pagu murni yang dianggarkan **Rp 108.398.244.300,-** setelah perubahan menjadi **Rp 111.790.119.300,-** adapun realisasinya sebesar **Rp 106.914.176.545,-** dengan rincian untuk **Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)** dianggarkan **Rp 12.284.068.740,-** adapun realisasinya sebesar **Rp 11.091.995.307,-** untuk **Belanja Langsung Urusan (BLU)** dianggarkan **Rp 8.907.368.860,-** adapun realisasinya sebesar **Rp 6.084.040.238,-** untuk **Belanja Hibah** dianggarkan **RP. 96.682.721.938,-** adapun realisasi **Rp 89.751.766.000,-** untuk **Belanja Tidak Langsung (BTL)** dianggarkan sebesar **Rp 9.149.542.000,-** adapun realisasinya sebesar **Rp 8.892.463.853,-**

Secara keseluruhan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi pada Tahun 2024 telah memenuhi harapan. Meskipun demikian pada Tahun 2024 dan seterusnya akan terus ditingkatkan akselerasinya dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah. Agar senantiasa dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai diharapkan adanya kerjasama, saling pengertian dari berbagai pihak yang terkait baik kritik dan saran sebagai bahan masukan untuk perbaikan dimasa datang.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran yang telah ditetapkan menunjukan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kesbangpol Kota Bekasi ke depan, sebagai berikut :

1. Keadaan masyarakat Kota Bekasi yang heterogen sehingga dapat menjadi salah satu pemicu munculnya gesekan sosial;
2. Masih terdapat peredaran gelap Narkoba di Kota Bekasi yang memerlukan perhatian, penanganan dan penanggulangan dengan deteksi dini dan pencegahan dini yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat;

3. Masih adanya masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu karena kurangnya pemahaman tentang politik dan demokrasi;
4. Masih adanya Organisasi Kemasyarakatan yang tidak melaporkan organisasinya ke Badan Kesbangpol Kota Bekasi;
5. Masih maraknya kenakalan remaja yang mengancam keselamatan dan kenyamanan masyarakat Kota Bekasi;
6. Mempertahankan Kota Bekasi sebagai Kota dengan predikat baik dalam kerukunan dan toleransi masyarakat (*The City of Tolerance*).

Sebagai penutup, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 ada manfaatnya bagi sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan yang semakin baik.

Semoga ALLAH SWT senantiasa membimbing kita selalu.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI.....	5
1.3 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA	11
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	13
1.5 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI.....	15
1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN DAN PENULISAN	20
BAB 2.....	22
PERENCANAAN KINERJA	22
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	22
2.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	23
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	26
2.4 PERJANJIAN KINERJA 2024	27
BAB 3.....	30
AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	30
3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	31
3.3 REALISASI ANGGARAN	49
3.4 INOVASI	56
3.5 PRESTASI DAN PENGHARGAAN	58
3.6 KOLABORASI LINTAS SEKTOR.....	59
BAB 4.....	71
PENUTUP	71
4.1 KESIMPULAN	71
4.2 KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA	71
4.3 RENCANA TINDAK.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi Berdasarkan Unit Kerja	7
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi Menurut Pendidikan (s.d bulan Desember 2024)	8
Tabel 1. 3 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per Desember 2024	11
Tabel 1. 4 Daftar Sarana Perkantoran Dan Kondisinya Per Desember 2024 ..	11
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Tahun 2024-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	25
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol Kota Bekasi	27
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol	28
Tabel 2. 4 Pagu anggaran Bakesbangpol	29
Tabel 3. 1 Analisis Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi TA 2024	31
Tabel 3. 2 Capaian Program Badan Kesbangpol untuk Mendukung Sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2024	33
Tabel 3. 3 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja 2024 dengan Tahun lalu (Sasaran Strategis 1)	34
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Akhir Renstra-PD (Sasaran Strategis 1)	34
Tabel 3. 5 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Nasional (Sasaran Strategis 1)	35
Tabel 3. 6 Analisis Pencapaian Indikator Utama Persentase Kasus SARA yang diselesaikan	36
Tabel 3. 7 Capaian Program Badan Kesbangpol Untuk Mendukung Sasaran Terwujudnya kerukunan, Toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi	38
Tabel 3. 8 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja 2024 dengan Tahun lalu (Sasaran Strategis 2)	46
Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Akhir Renstra-PD (Sasaran Strategis 2)	47
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Nasional (Sasaran Strategis 2)	47
Tabel 3. 11 Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Per Program Tahun 2024	49
Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024 dan Perbandingan dengan tahun 2023	51
Tabel 3. 13 Renja Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Diagram Pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Esselonoring	7
Gambar 1. 2	Diagram pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Unit Kerja	8
Gambar 1. 3	Diagram pegawai Badan Kesbangpol Menurut Pendidikan	9
Gambar 1. 4	Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	10
Gambar 3. 1	Dokumentasi kegiatan Pembinaan penguatan ideologi Pansila dan Karakter Bangsa Tahun 2024	41
Gambar 3. 2	Dokumentasi kegiatan Pendidikan Politik Daerah Tahun 2024	42
Gambar 3. 3	Dokumentasi kegiatan Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2024	43
Gambar 3. 4	Dokumentasi Kegiatan Sinergitas Kerukunan Umat Beragama Pemerintah Daerah dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kota Bekasi Tahun 2024	44
Gambar 3. 5	Dokumentasi Kegiatan Kewaspadaan Dini dan Deteksi Dini Tahun 2024	45
Gambar 3. 6	Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Terpadu Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bekasi Tahun 2024	56
Gambar 3. 7	Dokumentasi Fasilitasi Kegiatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bekasi Tahun 2024	57
Gambar 3. 8	Dokumentasi Penghargaan Kota Bekasi Peringkat ke-2 sebagai Kota Toleran se-Indonesia di Tahun 2024	58

1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu persyaratan terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja tahunan dan menyampaikan ke Wali Kota Bekasi.

Oleh karena itu, melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan misi organisasi dapat diukur dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan. Evaluasi kinerja tersebut dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap 3 aspek, yaitu:

- 1) **Akuntabilitas Manajemen**, aspek ini terfokus pada pengukuran kesanggupan dan efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya manajemen, seperti dana, asset (harta kekayaan), tenaga kerja, maupun sumber daya yang lain;

- 2) **Akuntabilitas Proses**, aspek ini terfokus pada pertanggungjawaban kebijakan, strategis dan proses pelaksanaan kinerja organisasi yang telah dilakukan. Proses ini dimulai dari perumusan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian sampai dengan evaluasi serta tindakan-tindakan koreksi terhadap proses yang sudah dilakukan;
- 3) **Akuntabilitas Program**, pengukuran ini dilakukan terhadap program-program organisasi yang telah dilakukan apakah telah memberikan kepuasan kepada publik. Selama ini, keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap sumber daya, terutama anggaran, sedangkan yang lainnya diabaikan, seharusnya keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Tujuan penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, hasil guna, bersih dan akuntabel serta mendorong tercapainya good governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya;
3. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis;
4. Menilai apakah pencapaian output dan outcome kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditentukan serta waktu yang disediakan.

Penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tahun 2024 dimaksudkan untuk menyajikan Capaian Indikator Utama (IKU) dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Teknokratik tahun 2024-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Perubahan Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2024-2026 merancang strategi pembangunan secara komprehensif mencakup aspek tata kelola pemerintahan, pembangunan manusia, keamanan dan ketertiban kota, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan ekonomi. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi berkaitan langsung

dengan aspek tata kelola pemerintahan, serta keamanan dan ketertiban kota yang ada pada RPD Kota Bekasi, maupun Sasaran yang ada pada Renstra Teknokratik PD Tahun 2024-2026. Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

- Indikator Sasaran I :

Nilai AKIP Badan Kesbangpol dengan satuan nilai. Indikator ini dipilih untuk mendukung sasaran strategis Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Alasan dipilihnya indikator ini adalah untuk menindaklanjuti amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Pada RPD Kota Bekasi 2024-2026 dijelaskan bahwa Tujuan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan 1 RPD 2024-2026 Kota Bekasi adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah, yang salah satu indikatornya menetapkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan tersebut kemudian diformulasikan ke dalam IKU 1 Badan Kesbangpol.

- Indikator Sasaran II :

Persentase Kasus SARA yang diselesaikan dengan satuan persen (%). Indikator ini dipilih untuk mendukung sasaran strategis Terwujudnya kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi. Alasan dipilihnya indikator ini adalah untuk menindaklanjuti amanah Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Pada RPD Kota Bekasi 2024-2026 dijelaskan bahwa Tujuan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan 4 RPD 2024-2026 Kota Bekasi adalah Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman, dengan Sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat yang salah satu indikatornya menetapkan Prosentase Kerjasama

Antar Kelompok Sara. Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan tersebut kemudian diformulasikan ke dalam IKU 2 Badan Kesbangpol.

Jika melihat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun sebelumnya (2024) dimana 2 (dua) indikator

tersebut telah terealisasi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Teknokratik PD pada Tahun 2024, dengan realisasi capaian indikator sasaran ke-1 yaitu indikator Nilai AKIP Badan Kesbangpol mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi sebesar 76,72 sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu predikat nilai BB, sasaran ke-2 yaitu Persentase Kasus SARA yang diselesaikan memperoleh capaian kinerja sebesar sebesar 100%, sasaran. Adapun pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam mendukung Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan dibahas pada Bab III Akuntabilitas Kinerja pada laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tahun 2024 ini.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 129 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, mempunyai Kepala Badan Kesbangpol mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi, sebagai berikut :

1. Tugas Pokok yaitu :

Membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan nasional dan penanganan konflik untuk mencapai visi dan misi Badan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi, yaitu :

- 1) perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- 2) penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 3) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4) pembinaan administrasi perkantoran;
- 5) pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang perhubungan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
- 6) pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;
- 7) pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- 8) penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 9) pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 10) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi yang memiliki kewewenangan dalam pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan dalam bidang Pemerintahan Umum, serta memiliki peran penting di dalam menjaga stabilitas pembangunan di Kota Bekasi. Peran tersebut akan sangat mempengaruhi kestabilan dinamika pembangunan di Kota Bekasi. Badan Kesbangpol Kota Bekasi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.

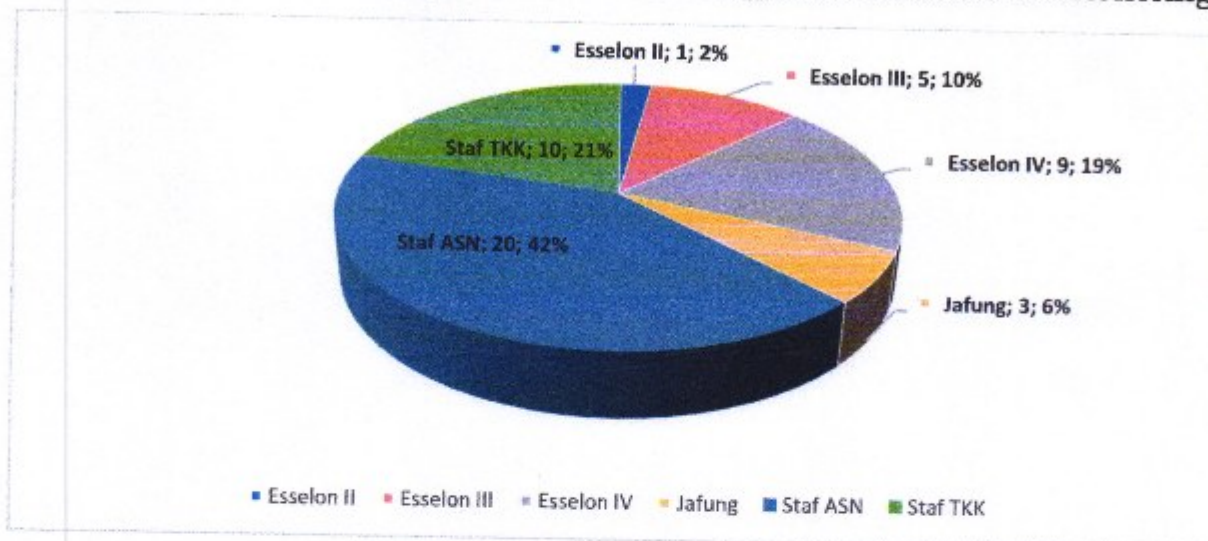
Bakesbangpol adalah sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana kewenangan Daerah, dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kebijakan pelayanan di bidang urusan penunjang lainnya dalam hal Pemerintahan Umum, Trantibum, serta Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Bakesbangpol tersebut, maka diberlakukanlah Peraturan Walikota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Dalam Perwal tersebut dijelaskan bahwa Bakesbangpol Kota Bekasi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bakesbangpol dibantu oleh Sekretaris Bakesbangpol yang mengelola perencanaan, umum dan kepegawaian juga keuangan dan didukung oleh 4 (empat) bidang yaitu: Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, serta Bidang Politik Dalam Negeri.

Badan Kesbangpol Kota Bekasi dalam melaksanakan tupoksi pelayanan didukung dengan oleh 48 pegawai yang terdiri dari 38 orang Aparatur Sipil Negara dan 10 Orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Secara sederhana, gambaran

pegawai pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi menurut jabatan/ eselon dapat dilihat dari gambar diagram di bawah ini :

Gambar 1. 1 Diagram Pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Esselonoring



Sejumlah pegawai yang tersedia di Badan Kesbangpol Kota Bekasi tersebut kemudian ditempatkan ke unit-unit kerja yang tersedia, dengan perincian sebagai berikut:

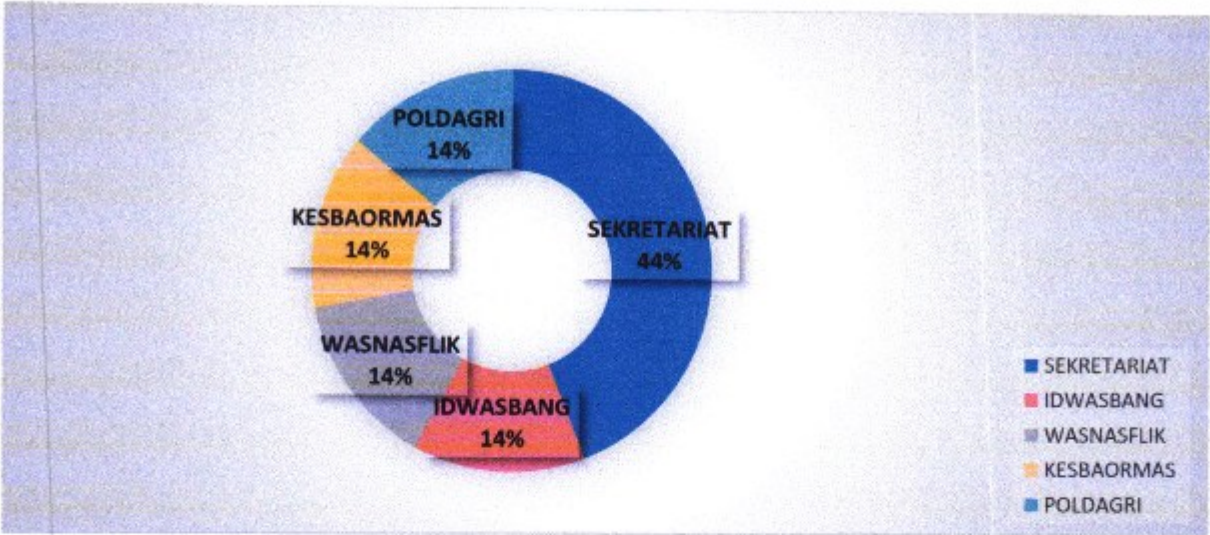
Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi Berdasarkan Unit Kerja (s.d bulan Desember 2024)

NO	Sekretariat/ Bidang	ASN			TKK			Total
		L	P	JML	L	P	JML	
1	Sekretariat	6	7	13	4	3	7	20
2	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	4	1	5	1	1	2	7
3	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	6	1	7	-	-	-	7
4	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	5	2	7	-	-	-	7
5	Bidang Politik Dalam Negeri	6	-	6	-	1	1	7
Jumlah Total		26	11	38	5	5	10	48

Sumber Data: Umpeg Badan Keshangpol (Diolah Perencanaan)

Secara sederhana, gambaran pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi berdasarkan unit kerja dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 1. 2 Diagram pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Unit Kerja



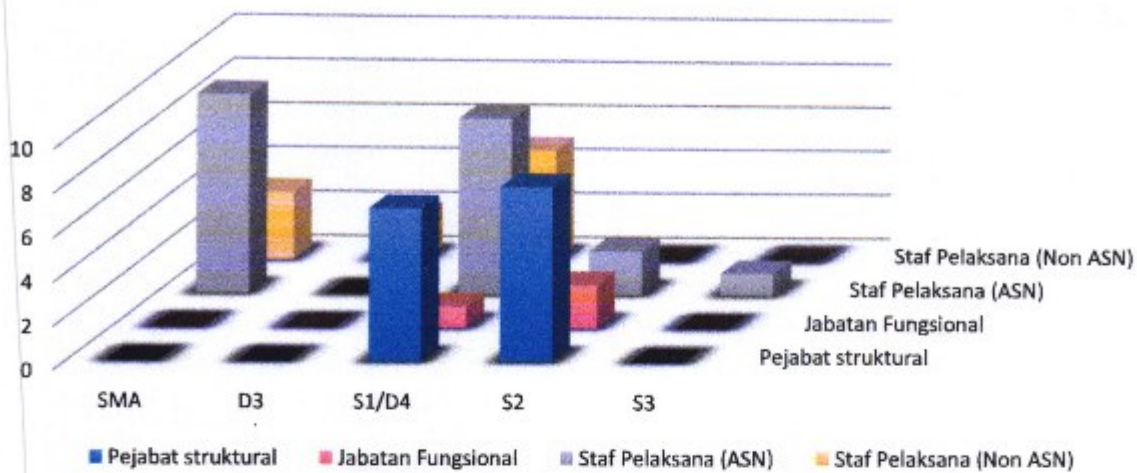
Apabila pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi ditinjau dari segi pendidikan, maka akan di dapatkan data pegawai sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi Menurut Pendidikan (s.d bulan Desember 2024)

SDM	Jumlah	Pendidikan Terakhir				
		S3	S2	S1/D4	D3	SMA
Pejabat struktural	15	-	8	7	-	-
Jabatan Fungsional	3	-	2	1	-	-
Staf Pelaksana (ASN)	20	1	2	8	-	9
Staf Pelaksana (Non ASN)	10	-	-	5	2	3
Jumlah	48	1	12	21	2	12

Sumber Data : Umpeg Badan Kesbangpol (Diolah Perencanaan)

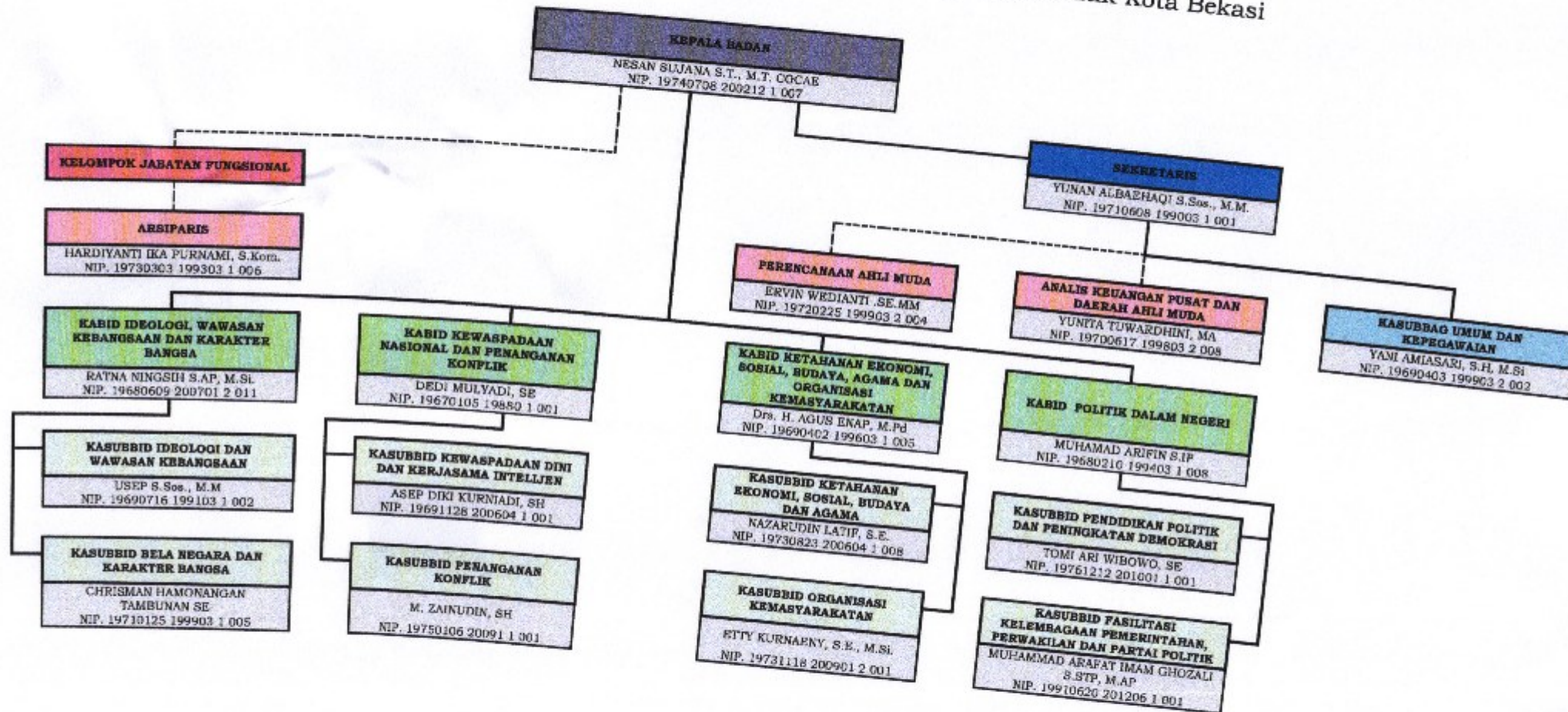
Berdasarkan data di atas, pegawai Badan Kesbangpol yang berpendidikan SMA sebanyak 25%, berpendidikan D3 sebanyak 4,17% , berpendidikan S1/D4 sebanyak 43.75%, berpendidikan S2 sebanyak 25% dan berpendidikan S3 sebanyak 2,08%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata pegawai Badan Kesbangpol berpendidikan SMA dan S1/D4. Secara sederhana, gambaran pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi menurut pendidikan dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 1. 3 Diagram pegawai Badan Kesbangpol Menurut Pendidikan

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :

1. Kepala Badan, membawahkan:
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi:
 - a. Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik;
6. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STUKTUR ORGANISASI BAKESBANGPOL
 (Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021)
Gambar 1. 4 Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi



1.3 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, diperlukan sarana dan prasarana kerja serta asset perlengkapan yang dikelola sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per Desember 2024

NO	NAMA	JUMLAH	KONDISI
KIB A			
1	Kendaraan Roda 2	6	B
2	Kendaraan Roda 4	12	B
3	Mesin Absen (time Recorder)	1	B
4	Lemari Besi	40	B
5	Rak Besi	4	B
6	Filling Cabinet Besi	40	B
7	Brandkas	1	B
8	Lemari Kaca	2	B
9	CCTV	2	B
10	Projector/Infocus	1	B
11	Meja Kerja	48	B
12	Kursi Kerja	48	B
13	Televisi	1	B
14	Sound System	1	B
15	Wireless	1	B
16	Dispenser	3	B
17	Kulkas	2	B
18	Proteksi Kebakaran (Hydrant, Apar)	1	B
19	Camera digital	1	B
20	Komputer PC	28	B
21	Laptop	10	B
22	Printer	11	B
KIB B			
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	B

(Keterangan : B = baik, R = rusak)

Selain itu dalam rangka melaksanakan tugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, sarana yang mendukung adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 4 Daftar Sarana Perkantoran Dan Kondisinya Per Desember 2024

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ruang Rapat	1	Kondisi baik
2	Toilet/WC	1	Kondisi baik
3	Ruang Arsip	1	Kondisi baik
4	Ruang Repsepsionis dan kursi tunggu tamu	1	Kondisi baik
5	Ruang Kerja Kepala	1	Kondisi baik

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
6	Ruang Kerja Sekretaris	1	Kondisi baik
7	Ruang Kerja Sekretariat	1	Kondisi baik
8	Ruang Kerja Kepala Idwasbang	1	Kondisi baik
9	Ruang Kerja Bidang Idwasbang	1	Kondisi baik
10	Ruang Kerja Kepala Poldagri	1	Kondisi baik
11	Ruang Kerja Bidang Poldagri	1	Kondisi baik
12	Ruang Kerja Kepala Wasnasflik	1	Kondisi baik
13	Ruang Kerja Bidang Wasnasflik	1	Kondisi baik
14	Ruang Kerja Kepala Kesbaormas	1	Kondisi baik
15	Ruang Kerja Bidang Kesbaormas	1	Kondisi baik
16	Mushola Kantor	1	Kondisi baik
17	Kendaraan Dinas Kantor	1	Kondisi baik
18	Ruang Pantry	1	Kondisi baik
19	Air bersih dan listrik	Paket	Kondisi baik

Untuk sarana dan prasarana, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi belum terlalu ideal untuk ukuran kantor yang seharusnya. Salah satunya yaitu ruang pendukung seperti belum terdapat ruang perpustakaan dan ruang laktasi yang memadai. Hal ini perlu adanya perbaikan ruang kantor agar terciptanya yang lebih representatif.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"- 107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km² yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan propinsi (UU No. 23/2014). Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 23/2014 ini meliputi: demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Dari prinsip-prinsip dasar tersebut di atas, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan di era otonomi diorientasikan untuk *mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal*. Kesejahteraan rakyat pada hakikatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan yang sekurang-kurangnya harus meliputi aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan yang relatif merata, peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, terdapat beberapa isu-isu strategis yang terjadi di tahun 2024 yang di tangani oleh Badan Kesbangpol, diantaranya Kota Bekasi termasuk ke dalam Kota Multikultural yang terdiri dari banyaknya perbedaan unsur yang ada di dalam masyarakatnya yang terdiri dari berbagai suku, etnis, agama atau aliran kepercayaan, kondisi ini menjadikan Kota Bekasi sebagai daerah yang rawan konflik hal tersebut dapat menyebabkan masalah-masalah sosial yang muncul di Kota Bekasi, tidak terlepas dari meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dampaknya, kaum urban yang menjadi pengangguran menjadi beban ekonomi dan beban sosial yang berat bagi masyarakat dan pemerintah. Besarnya pengangguran akan meningkatkan kerawanan sosial di Kota Bekasi. Adapula peranan Bakesbangpol juga di tahun 2024 terhadap pelaksanaan pemilu serentak yang akan dilakukan di tahun 2024, prioritas Bakesbangpol di tahun 2024 terkait fasilitasi pemilu serentak mencakup berbagai aspek penting. Bakesbangpol berfokus pada penguatan koordinasi antara lembaga penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa semua tahapan pemilu berjalan lancar dan efektif. Selain itu, Bakesbangpol juga menekankan pentingnya kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pemilu, agar partisipasi pemilih dapat meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Di samping itu, Bakesbangpol berupaya menciptakan ekosistem pemilu yang sehat dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pemilu. Hal ini termasuk pengawasan terhadap praktik politik yang tidak etis, penyebaran informasi yang tidak akurat, menjaga kondusivitas dan mencegah konflik sosial, penguatan pendidikan politik, serta koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak untuk menciptakan iklim politik yang sehat. Bakesbangpol diharapkan dapat mengoptimalkan keberagaman politik sebagai kekuatan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dalam lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis, Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Bakesbangpol sebagai Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi yang menyelenggarakan urusan di

bidang Kesatuan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Kerukunan Beragama dan Kemasyarakatan, serta Politik Dalam Negeri memiliki tugas untuk menjamin terciptanya persatuan dan kesatuan Bangsa demi mendukung tercapainya tujuan pembangunan Daerah.

1.5 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Bakesbangpol pada tahun 2024 terdiri dari:

I. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

terdiri dari 7 kegiatan dan 16 Sub Kegiatan, yaitu :

- ✓ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- ✓ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- ✓ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- ✓ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- ✓ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ✓ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Belanja Langsung Urusan (BLU)

1.1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu:

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
 - Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1.2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

terdiri dari 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, yaitu:

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

1.3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu:

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya;
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

1.4. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik terdiri dari 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, yaitu:

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;
- Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

1.5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, yaitu:

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
 - Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Secara umum layanan organisasi Bakesbangpol menjalankan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi Badan Kesbangpol telah dialihkan menjadi fungsi urusan penunjang lainnya di bidang Ketentraman dan ketertiban umum.

Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Bakesbangpol yaitu:

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan advokasi terkait wawasan kebangsaan, 4 (empat) pilar kebangsaan, bela negara, penguatan fungsi-fungsi pembauran kebangsaan dan pembentukan serta pembinaan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) di Kota Bekasi. Bidang Kesatuan Bangsa juga memiliki tugas memberikan pelatihan kepada masyarakat pemula untuk dijadikan sebagai kader bela negara.
2. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, memiliki tugas dan fungsi dalam hal menciptakan kerukunan umat beragama dan kemasyarakatan. Produk-produk layanan dalam bidang ini antara lain Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah, Survei peninjauan lokasi rumah ibadah dan sekretariat ormas, merumuskan kebijakan ormas dan kemasyarakatan, menerima audiensi pengurus rumah ibadah, pengurus ormas dan tokoh agama/masyarakat, serta Surat Keterangan Terdaftar (SKT)/Surat Tanda Lapor bagi Organisasi Kemasyarakatan.
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terkait gejala/potensi kerawanan sosial yang ada di masyarakat. Melakukan kajian dan pemetaan wilayah kerawanan sosial di Kota Bekasi. Bidang ini juga

bertugas untuk memberikan fasilitasi kepada Tim Kewaspadaan Dini Daerah untuk melaksanakan tugas menjaga trantibum di Kota Bekasi. Produk layanan dari Bidang ini adalah Surat Tanda Lapor Orang Asing dan Laporan situasi dan kondisi daerah.

4. Bidang Politik Dalam Negeri, memiliki tugas dan fungsi memberikan palatihan, sosialisasi, dan pendidikan terkait politik dalam negeri kepada masyarakat, dan pengurus Partai Politik. Merumuskan kebijakan tentang bantuan hibah dan bantuan keuangan yang akan diberikan kepada Partai Politik dan Lembaga Pemerintah. Bidang ini juga memberikan fasilitasi terkait pelaksanaan Pemantauan Situasi Politik di daerah.

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN DAN PENULISAN

Sistematika penyajian LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Kontrak Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

2

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Bakesbangpol didasarkan atas Rencana Strategis Teknokratik Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja antara Pj. Wali Kota Bekasi dan Kepala Bakesbangpol Kota Bekasi TA. 2024, dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis dengan (dua) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program, kegiatan, sub kegiatan tahun 2024 dengan target satuan yang ingin dicapai dari program, kegiatan, sub kegiatan dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemenmendagri) Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 berisi tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, Rencana Strategis Teknokratik yang telah memuat tujuan dan sasaran dalam tujuan pembangunan Kota Bekasi untuk periode 2024-2026. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kopentensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan

strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan RPD Kota Bekasi yang telah ditetapkan dapat diketahui bahwa Pembangunan Kota Bekasi untuk periode 2024-2026 adalah dijabarkan ke dalam 5 tujuan, dan 11 sasaran. Dari ke 5 tujuan tersebut, Badan Kesbangpol Kota Bekasi memiliki keterkaitan secara tupoksi terhadap Tujuan 1 yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel" dan Tujuan 4 RPD yaitu "Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman". Sasaran 1 dan 4 RPD tersebut kemudian dijabarkan dalam 2 tujuan, yaitu:

1. Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi;
2. Terwujudnya kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi.

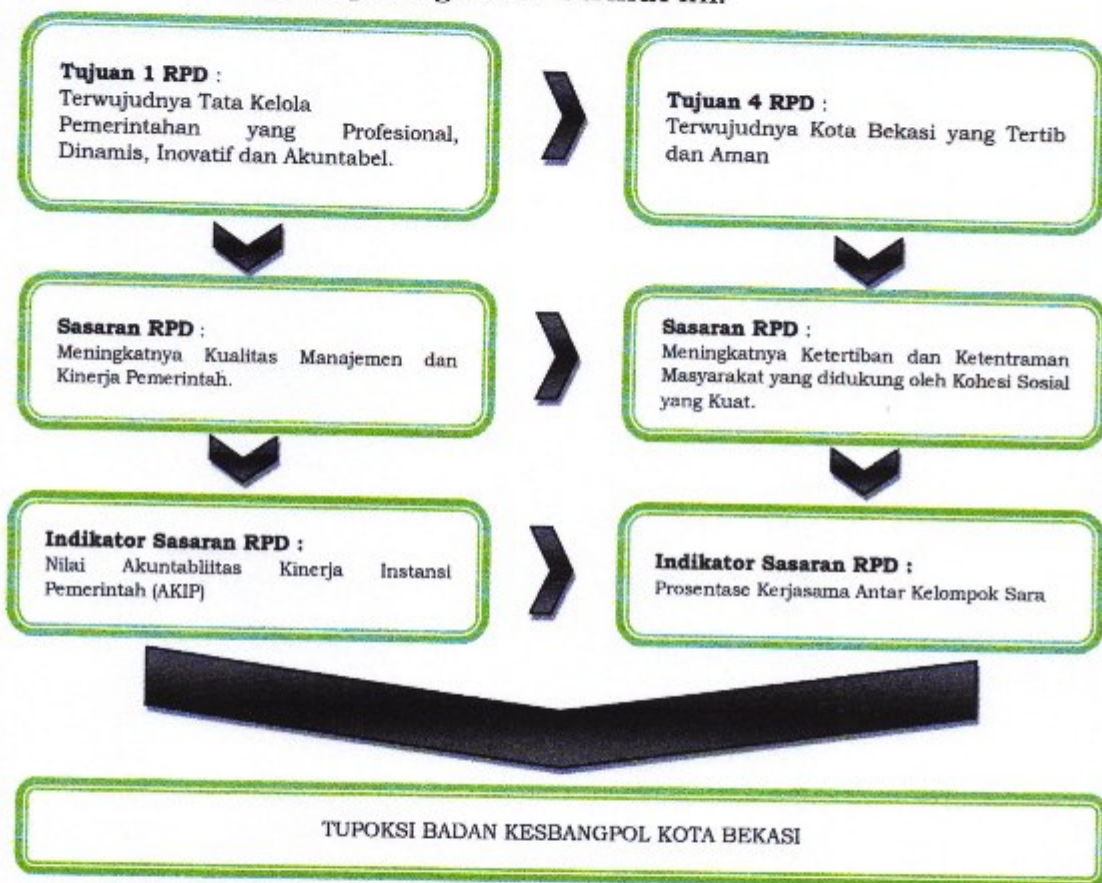
Dari misi tersebut, Badan Kesbangpol harus melakukan pemilahan terkait pencapaian tujuan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan. Berdasarkan pemilahan yang dilakukan terhadap tujuan-tujuan pembangunan yang ada di dalam 2 (dua) tujuan tersebut maka Badan Kesbangpol Kota Bekasi menetapkan tujuan pembangunan yang menjadi tujuan badan dari 2 (dua) sasaran RPD tersebut.

Untuk tujuan kesatu RPD Kota Bekasi, ditinjau dari tujuan tersebut Badan Kesbangpol Kota Bekasi memiliki keterkaitan secara tupoksi dengan Tujuan RPD "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel". Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel ini kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran "Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi" sasaran ini diukur melalui Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sedangkan untuk misi keempat RPD Kota Bekasi, dengan tujuan "Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman" memiliki keterkaitan erat tupoksi Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Tujuan ini

memiliki sasaran yaitu “*Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat.*” Sasaran ini kemudian diukur melalui indikator Persentase Kasus SARA yang diselesaikan. Tentunya indikator ini memiliki keterkaitan yang erat dengan tupoksi yang ada di Badan Kesbangpol.

Secara ringkas Tujuan, dan Sasaran RPD Kota Bekasi yang memiliki keterkaitan tupoksi dengan Badan Kesbangpol Kota Bekasi dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Berdasarkan penjelasan di atas maka Badan Kesbangpol Kota Bekasi menetapkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dituangkan ke dalam Rencana Startegis (Renstra) Teknokratik Badan Kesbangpol Kota Bekasi periode 2024-2026. Adapun tujuan dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi adalah:

1. Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
2. Merawat persatuan dan ksatuan masyarakat dengan mengembangkan aspek demokrasi, kebangsaan dan kerukunan serta keberagaman.

Untuk mencapai tujuan di atas maka dilakukan penetapan sasaran perangkat daerah guna mendukung tercapainya tujuan.

Sasaran adalah prediksi hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan (sampai dengan 1 tahun). Adapun sasaran dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi adalah:

- 1. Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi;
- 2. Terwujudnya kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi;

Secara terperinci, tabel 2.1 di bawah ini akan menyajikan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Pemaparan tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol yang telah ditetapkan ini akan dijabarkan ke dalam indikator sasaran untuk pencapaian target pelayanan selama 3 (tiga) tahun.

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Tahun 2024-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Data Existing	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-		
						1	2	3
						(2024)	(2025)	(2026)
1	Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Nilai AKIP Badan Kesbangpol		-	BB	BB	BB
				Nilai AKIP Badan Kesbangpol	-	BB	BB	BB
2	Merawat persatuan dan ksatuan masyarakat dengan mengembangk aspek demokrasi, kebangsaan dan kerukunan serta keberagaman	Terwujudnya kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarak at di Kota Bekasi	Persentase pembinaan persatuan dan kesatuan dengan mengembangkan aspek demokrasi, kebangsaand an kerukunan serta keberagaman bagi masyarakat yang dilaksanakan Kesbangpol Kota Bekasi			100%	100%	100%
				Persentase Kasus SARA yang diselesaikan	-	100%	100%	100%

Sumber Data: RPD Kota Bekasi 2024-2026 dan Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol 2024-2026

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menetapkan menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

1. Nilai AKIP Badan Kesbangpol dengan satuan nilai. Indikator ini dipilih untuk mendukung sasaran strategis Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Alasan dipilihnya indikator ini adalah untuk menindaklanjuti amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Pada RPD Kota Bekasi 2024-2026 dijelaskan bahwa Tujuan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan 1 RPD 2024-2026 Kota Bekasi adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel dengan Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah, yang salah satu indikatornya menetapkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan tersebut kemudian diformulasikan ke dalam IKU 1 Badan Kesbangpol;
2. Persentase Kasus SARA yang diselesaikan dengan satuan persen (%). Indikator ini dipilih untuk mendukung sasaran strategis Terwujudnya kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi. Alasan dipilihnya indikator ini adalah untuk menindaklanjuti amanah Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Pada RPD

Kota Bekasi 2024-2026 dijelaskan bahwa Tujuan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan 4 RPD 2024-2026 Kota Bekasi adalah Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman, dengan Sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat yang salah satu indikatornya menetapkan Prosentase Kerjasama Antar Kelompok Sara. Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan tersebut kemudian diformulasikan ke dalam IKU 2 Badan Kesbangpol;

Misi dan tujuan RPJMD tersebut kemudian diformulasikan ke dalam IKU Badan Kesbangpol. Untuk penjelasan lebih terperinci dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol Kota Bekasi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/ RUMUS	SATUAN	TARGET 2024
1	Terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik dari Badan Kesbangpol	Nilai AKIP Badan Kesbangpol	Hasil penilaian Laporan AKIP Badan Kesbangpol	Nilai	BB
2	Terwujudnya kerukunan, Toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi	Persentase Kasus SARA yang diselesaikan	(Jumlah Kasus SARA yang ditangani /Jumlah Kasus SARA yang dilaporkan) x 100%	Persen	100%

Sumber Data: Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol 2024-2026

2.4 PERJANJIAN KINERJA 2024

Berdasarkan pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Tata Kelola pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan berdasarkan atas hal tersebut, maka ditetapkan 6 (Enam) Program Pembangunan pada Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi penunjang urusan pada bidang penunjang tertentu lainnya seperti berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

- 5. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
- 6. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Program-program pada Bakesbagpol Kota Bekasi merupakan Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran strategis kesatu adalah Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi, dengan indikator kinerja Nilai AKIP yang diperoleh oleh Badan Kesbangpol. Pada Tahun 2024, indikator menargetkan pencapaian indikator nilai AKIP Kesbangpol dengan predikat nilai BB. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut, Bakesbangpol Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran strategis kedua Bakesbangpol yaitu Terwujudnya kerukunan, Toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi dengan target indikator kinerja yaitu Persentase Kasus SARA yang diselesaikan. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah kasus perselisihan SARA yang diselesaikan sebesar 100%. Pada Tahun 2024, Bakesbangpol menargetkan seluruh kasus perselisihan Suku, Ras dan Antar Golongan dapat tertangani dengan baik. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Bakesbangpol Kota Bekasi melaksanakan 5 (lima) program, yaitu Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Program Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	Terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik	Nilai AKIP Badan Kesbangpol	Nilai	Bb	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	BB

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
	dari Badan Kesbangpol					
2	Terwujudnya kerukunan, Toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi	Persentase Kasus SARA yang diselesaikan	% (Persen)	100	Triwulan 1	25%
					Triwulan 2	25%
					Triwulan 3	25%
					Triwulan 4	25%

Sumber Data: Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesbangpol Kota Bekasi TA 2024 dan Rencana Aksi 2024.

Untuk mencapai hasil kinerja pada tabel di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi diberikan dukungan anggaran APBD Kota sebesar Rp. 111.790.119.300,- dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Pagu anggaran Bakesbangpol

	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	TRIWULAN	TARGET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.284.068.740,-	Triwulan I	Rp. 3.948.317.041,-
			Triwulan 2	Rp. 3.976.651.709,-
			Triwulan 3	Rp. 2.444.021.052,-
			Triwulan 4	Rp. 1.915.078.938,-
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 2.290.812.860,-	Triwulan I	Rp. 312.832.800,-
			Triwulan 2	Rp. 831.278.820,-
			Triwulan 3	Rp. 1.138.280.540,-
			Triwulan 4	Rp. 8.420.700,-
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 8.595.411.700,-	Triwulan I	Rp. 5.952.050.000,-
			Triwulan 2	Rp. 2.643.361.700,-
			Triwulan 3	Rp. 0,-
			Triwulan 4	Rp. 0,-
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 84.282.426.000,-	Triwulan I	Rp. 79.407.875.000,-
			Triwulan 2	Rp. 532.220.000,-
			Triwulan 3	Rp. 998.736.000,-
			Triwulan 4	Rp. 3.343.595.000,-
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 1.000.000.000,-	Triwulan I	Rp. 92.012.000,-
			Triwulan 2	Rp. 907.988.000,-
			Triwulan 3	Rp. 0,-
			Triwulan 4	Rp. 0,-
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 3.337.400.000,-	Triwulan I	Rp. 1.023.960.000,-
			Triwulan 2	Rp. 1.190.130.000,-
			Triwulan 3	Rp. 691.169.000,-
			Triwulan 4	Rp. 432.141.000,-

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesbangpol Kota Bekasi TA. 2024 dan Rencana Aksi TA. 2024

3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja institusi pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Proses pengukuran kinerja dilakukan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang di dalamnya menyajikan beberapa. Dokumen LKIP disusun dengan melakukan analisa dan pengumpulan data pendukung untuk melihat seberapa besar sasaran kinerja yang ditargetkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dicanangkan pada Tahun 2024 dapat dicapai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi disusun dengan berpedoman kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dilakukan dengan mengukur indikator kinerja pada setiap sasaran strategis yang ada di Rencana Strategis (Renstra) Teknokratik Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, dan aspek realisasi pelaksanaannya.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Bakesbangpol Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan. Pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi telah melaksanakan tahapan-tahapan pembangunan untuk mencapai Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:

1. Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Bdan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;

2. Mewujudkan kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi;

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Analisis Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi TA 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	KETERANGAN
1	Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Nilai AKIP Kesbangpol	Nilai	BB	BB	Tercapai
2	Terwujudnya kerukunan, Toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi	Persentase Kasus SARA yang diselesaikan	%	100	100	Tercapai

(Sumber Data: Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol 2024-2026)

Secara keseluruhan capaian sasaran Badan Kesbangpol mencapai 100%. Untuk indikator ke-1 dengan sasaran terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi menggunakan model perhitungan Penilaian Laporan AKIP Badan Kesbangpol.

Pada indikator ke-2 dengan sasaran Terwujudnya kerukunan, Toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi menggunakan model perhitungan Persentase Kasus SARA yang diselesaikan dengan rincian:

$$\frac{\text{Jumlah Kasus SARA yang ditangani}}{\text{Jumlah Kasus SARA yang dilaporkan}} \times 100 \%$$

Pembahasan lebih rinci terkait 2 (dua) sasaran kinerja Badan Kesbangpol akan dibahas pada bagian Analisi Capaian Kinerja pada sub bab selanjutnya.

3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan penjabaran tabel Analisis Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol di atas, dapat ditarik analisa mengenai pencapaian kinerja Badan Kesbangpol TA 2024. Adapun evaluasi dan analisa kinerja sasaran sebagai berikut:

- 1. **Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi.**

Sasaran yang pertama adalah terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Nilai AKIP Kesbangpol. Sasaran ini menekankan tentang kualitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Kesbangpol kepada masyarakat. Target yang ditetapkan untuk sasaran terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik adalah nilai AKIP Kesbangpol dengan predikat nilai Bb. Adapun realisasi nilai yang berhasil didapatkan oleh Kesbangpol sebesar Bb. Upaya-upaya yang telah dilakukan Badan Kesbangpol untuk mendapatkan Nilai SAKIP BB adalah sebagai berikut:

- ✓ Melakukan sinkronasi di dalam menyusun dokumen perencanaan 3 (tiga) tahun perangkat daerah (Teknokratik). Sinkronasi tersebut dilakukan dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang selaras dengan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, RPJPD Kota Bekasi, RPJMD Provinsi dan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, serta RPJMN Kemendagri dan Renstra Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (PUM) Kemendagri RI;
- ✓ Melakukan sinkronasi di dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah. Sinkronasi tersebut dilakukan dengan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Perangkat Daerah yang selaras dengan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2024, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
- ✓ Melakukan penyusunan dokumen penerjemah dari dokumen perencanaan secara terperinci yang meliputi seluruh aspek pencapaian kinerja perencanaan perangkat daerah. Dokumen penerjemah yang dimaksud antara lain:
 - Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesbangpol Tahun Anggaran 2024;
 - Tabel alur sasaran dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 pada Badan Kesbangpol;
 - Tabel keselerasan perencanaan Badan Kesbangpol Tahun Anggaran 2024;
 - Rencana Aksi kinerja pada Badan Kesbangpol untuk Tahun Anggaran 2024;
 - Pohon kinerja Badan Kesbangpol Tahun Anggaran 2024;
 - Cross Cutting Kinerja Badan Kesbangpol Tahun Anggaran 2024;

- o Cascading Badan Kesbangpol dan cascading Indikator Kinerja Individu (IKI) aparatur Badan Kesbangpol Tahun Anggaran 2024; dan
 - o Melakukan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) per eselon hingga ke tingkat staff aparatur Badan Kesbangpol Kota Bekasi.
- ✓ Melakukan penyusunan dokumen monitoring dan pencapaian evaluasi dari pencapaian kinerja perencanaan perangkat daerah. Dokumen penerjemah yang dimaksud antara lain:
- o Evaluasi capaian kinerja Tahun Anggaran 2024 per triwulan;
 - o Evaluasi capaian kinerja fisik (Monev dan Simpelbang) Tahun Anggaran 2024 per triwulan;
 - o Evaluasi capaian kinerja fisik dan anggaran Tahun 2024 per bulan.
- Dengan demikian, gambaran umum pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari indikator program yang mendukungnya. Pencapaian program adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Program Badan Kesbangpol untuk Mendukung Sasaran Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2024

NO	PROGRAM	IDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI 2024	SATUAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	%	Tercapai
		Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	%	Tercapai
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	100	%	Tercapai
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	%	Tercapai

Sumber : Sekretariat Badan Kesbangpol

- **Perbandingan antara Data Kinerja yang telah dilaksanakan Tahun 2024 dengan Tahun lalu.**

IKU 1 : Nilai AKIP Kesbangpol

Defenisi Operasional :

Hasil Evaluasi SAKIP PD dari Inspektorat (Tahun n-1).

Dimana semakin tinggi nilai SAKIP PD berarti semakin tinggi tingkat kinerja PD.

- o Realisasi Data Kinerja Tahun 2024:
 - Nilai LKIP (SAKIP) Kesbangpol (2023) : Bb (75,14)
 - Nilai LKIP (SAKIP) Kesbangpol (2024) : Bb (76,72)

Sebagaimana *definisi Operasional*, maka:
Realisasi Data Kinerja = Bb

Selanjutnya, perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Kesbangpol Tahun 2024 dengan Tahun lalu, sebagaimana tergambar pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3. 3 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja 2024 dengan Tahun lalu (Sasaran Strategis 1)

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1	Nilai AKIP Kesbangpol	Nilai	BB (75,14)	BB (76,72)

Berdasarkan penyajian tabel tersebut diatas, dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu mengalami kenaikan dan melebihi target yang telah ditentukan.

- **Realisasi Kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan target dalam Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol Tahun 2024-2026.**

Pada tahun pertama (2024) Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol Kota Bekasi, manargetkan Nilai AKIP Kesbangpol adalah dengan predikat nilai BB. Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target realisasi kinerja pada Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol Kota Bekasi tahun 2024-2026, realisasi kinerja tahun 2024 sudah sesuai dengan target yang ditentukan dengan nilai Bb, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Akhir Renstra-PD (Sasasaran Strategis 1)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian s.d Tahun 2024 (Nilai)	Tahun 2024		Capaian Tahun Terakhir Renstra (Nilai)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai AKIP Kesbangpol	Nilai	BB	BB	BB (76,72)	BB	BB	BB (70)

- **Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional (jika ada)**
Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Strategis 1 (Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi) ini dilakukan dengan cara

membandingkan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar atau target nasional (jika ada).

Secara khusus untuk IKU pada Sasaran Strategis 1 ini, bahwa pada tingkat nasional secara khusus tidak terdapat target mengenai indikator kinerja ini sebagaimana tergambar pada tabel 3.5 berikut.

Tabel 3. 5 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Nasional (Sasaran Strategis 1)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Nasional Tahun 2024
1	Nilai AKIP Kesbangpol	BB (76,72)	Tidak Ada

2. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya kerukunan, Toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi.

Sasaran strategis yang kedua adalah Terwujudnya kerukunan, Toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi. Sasaran ini diukur dengan menggunakan Indikator **Persentase Kasus SARA yang diselesaikan**. Pada tahun 2024, indikator kinerja ini telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian indikator ini dihitung dari formula penghitungan yaitu jumlah kasus SARA yang ditangani dibagi jumlah kasus SARA yang dilaporkan dikali 100%. Jumlah konflik yang terjadi ini dilihat dari kejadian-kejadian yang terjadi di Kota Bekasi selama tahun 2024, yang jika dianalisis dapat menimbulkan potensi kondlik di Kota Bekasi. Jumlah konflik yang terjadi dan terdata dari bulan Januari 2024 hingga Desember 2024 sebanyak 39 kasus yang dimana dari laporan tersebut sebagian besar didominasi dari proses pelaksanaan pemilu serentak yang merupakan rangkaian, tahapan proses pelaksanaan dari pesta demokrasi di Tahun 2024. Laporan yang terindikasi mengenai SARA di tahun 2024 hanya terdapat 1 kasus, yang dimana kasus tersebut juga sangat berpotensi konflik, akan tetapi kasus tersebut dapat ditangani dan diselesaikan melalui penanganan bersama pihak-pihak yang terlibat. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Analisis Pencapaian Indikator Utama Persentase Kasus SARA yang diselesaikan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Persentase Kasus SARA yang diselesaikan	%	100	100	100

Sumber Data: Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol 2024-2026

Berdasarkan tabel di atas, Badan Kesbangpol berhasil menekan jumlah kejadian perselisihan SARA di masyarakat. Umumnya penyebab perselisihan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) yang terjadi di Kota Bekasi adalah tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan yang sangat bersifat sensitif karena menyangkut tentang agama, kebangsaan/suku dan antar golongan. Tingkat pencapaian Badan

Kesbangpol di dalam menangani kasus SARA di masyarakat sebesar 100% yang artinya target tercapai.

Adapun faktor-faktor yang mendukung tercapainya target tersebut adalah:

- a. Dukungan dana dari Pemerintah Kota Bekasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;
- b. Terbangunnya koordinasi yang baik diantara stakeholder terkait, Badan Kesbangpol bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Kewaspadaan Dini dan Forkopimda saling sinergis dalam rangka meminimalisir terjadinya konflik perselisihan SARA di masyarakat yang mencakup antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya di Kota Bekasi. Pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam mengurangi konflik yang berkaitan dengan SARA. Untuk itu, pemerintah harus berusaha menciptakan suasana yang mendukung toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi masalah SARA di masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi keagamaan, perlu terlibat dalam upaya ini.
- c. Dukungan warga Kota Bekasi secara keseluruhan dalam menjaga kondusifitas Kota Bekasi.
- d. Komitmen, kerja keras dan usaha seluruh pegawai dari Badan Kesbangpol sendiri.

Tercapainya target kinerja sasaran ini tidak bisa lepas dari tercapainya program perangkat daerah sebagai pendukung sasaran. Terdapat 5 (lima) program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Berikut tabel Program, Indikator Program, Target, dan Realisasi serta Capaian Kinerja Program pada tahun 2024 ini:

Tabel 3. 7 Capaian Program Badan Kesbangpol Untuk Mendukung Sasaran Terwujudnya kerukunan, Toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi

NO	PROGRAM	IDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAAN	KET
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100	100%	Tercapai
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah	100	100	100%	Tercapai
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Optimalisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	100	100	100%	Tercapai
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	100	100%	Tercapai
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Daerah	100	100	100%	Tercapai

Sumber Data: Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol 2024-2026

Korelasi antara program-program yang disebutkan dengan sasaran terwujudnya kerukunan, toleransi, dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- Program ini berfokus pada penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan karakter kebangsaan. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami pentingnya kerukunan dan toleransi antar sesama, serta mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Hal ini akan menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghargai di antara berbagai kelompok masyarakat.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

- Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan etika dalam berpolitik. Dengan pendidikan politik yang baik, masyarakat akan lebih memahami pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan politik, serta menghargai perbedaan pendapat, yang merupakan bagian dari kerukunan dan toleransi.

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Melalui pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, masyarakat dapat lebih terlibat dalam kegiatan sosial dan pembangunan. Program ini juga mencakup pengawasan untuk memastikan bahwa organisasi-organisasi tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dengan adanya organisasi yang kuat dan berfungsi dengan baik, masyarakat dapat lebih mudah berkolaborasi dan berpartisipasi dalam menciptakan kerukunan dan toleransi.

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

- Ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yang baik akan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan stabil. Ketika masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan, potensi konflik dapat diminimalisir. Program ini juga dapat mendorong masyarakat untuk saling mendukung dan bekerja sama, sehingga meningkatkan kerukunan dan toleransi di antara berbagai kelompok.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial:

- Program ini berfokus pada pencegahan dan penanganan konflik sosial yang mungkin terjadi. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan dalam menangani konflik, masyarakat dapat lebih cepat merespons potensi permasalahan yang dapat mengganggu kerukunan. Program ini juga dapat menciptakan ruang dialog yang konstruktif, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan perbedaan dengan cara yang damai.

Secara keseluruhan, semua program tersebut saling mendukung dan berkontribusi pada terciptanya kerukunan, toleransi, dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan kesadaran politik, memberdayakan organisasi kemasyarakatan, membangun ketahanan sosial dan ekonomi, serta menangani konflik secara efektif, masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan saling menghargai.

Penjelasan capaian Kinerja Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Gambar 3. 1 Dokumentasi kegiatan Pembinaan penguatan ideologi Pansila dan Karakter Bangsa Tahun 2024



Program ini memiliki satu indikator program yaitu Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan tercapai 100% dari target 100%. Adapun formula indikatornya adalah *jumlah fasilitasi pembinaan ATHG Nasionalisme NKRI yang ditangani dibagi jumlah ATHG Nasionalisme NKRI yang diterima Badan Kesbangpol dikali 100%*. Pada tahun 2024 ini jumlah peserta yang mendapat pembinaan dan pendidikan wawasan kebangsaan sebanyak 1620 Orang yang telah dilakukan Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Mengenai cakupan program Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebagaimana dimaksud merupakan peranan atau upaya Badan Kesbangpol, khususnya Bidang yang mengurus urusan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa di Kota Bekasi dalam rangka menjaga Nasionalisme NKRI di Kota Bekasi. Adapun pembinaan sebagaimana dimaksud:

- Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kota Bekasi;
- Fasilitasi Pendidikan Bela Negara di Kota Bekasi;
- Fasilitasi Pendidikan Konsepsi Wawasan Kebangsaan dan nilai-nilai pancasila di Kota Bekasi;
- Pembentukan dan Pembinaan Akitivitas Paskibraka Kota Bekasi.

2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Gambar 3. 2 Dokumentasi kegiatan Pendidikan Politik Daerah Tahun 2024



Program ini memiliki satu indikator program yaitu Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah tercapai 100% dari target 100%. Adapun formula indikatornya adalah *jumlah fasilitasi penanganan ATHG kondusifitas politik daerah yang ditangani dibagi jumlah ATHG kondusifitas politik daerah yang diterima Badan Kesbangpol dikali 100%*. Pada tahun 2024 ini jumlah peserta yang mendapat pembinaan dan pendidikan politik daerah sebanyak 2400 Orang yang telah dilakukan Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Di sisi lain, cakupan program Pembinaan Politik Daerah sebagaimana dimaksud merupakan peranan atau upaya Badan Kesbangpol, khususnya Bidang yang menangani urusan Politik Dalam Negeri terkait upaya menjaga stabilitas Politik di Kota Bekasi. Adapun pembinaan Politik sebagaimana dimaksud diantaranya:

- a. Fasilitasi Pendidikan Politik bagi masyarakat Kota Bekasi;
- b. Fasilitasi bantuan keuangan bagi parpol di Kota Bekasi yang mendapat hak dan kedudukannya di parlemen;
- c. Fasilitasi bantuan dana hibah bagi lembaga pemerintah di Kota Bekasi. (KPU, BAWASLU, POLRES, KODIM)

3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Gambar 3. 3 Dokumentasi kegiatan Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2024



Program ini memiliki satu indikator program yaitu Optimalisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan tercapai 100% dari target 100%. Adapun formula indikatornya adalah *jumlah fasilitasi pembinaan organisasi kemasyarakatan yang ditangani dibagi jumlah kebutuhan fasilitasi organisasi kemasyarakatan yang diterima Badan Kesbangpol dikali 100%*. Pada tahun 2024 ini jumlah peserta yang mendapat pembinaan dan pemberdayaan kepada organisasi kemasyarakatan memiliki target 300 Orang yang telah dilakukan Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Sementara itu, cakupan program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud merupakan peranan atau upaya Badan Kesbangpol, khususnya Bidang yang memiliki tugas urusan Organisasi Kemasyarakatan terkait upaya peningkatan partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Kota Bekasi. Adapun pembinaan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud diantaranya:

- a. Fasilitasi bantuan dana hibah bagi Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bekasi;
- b. Fasilitasi legalitas Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bekasi;
- c. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang undangan yang berlaku terkait Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bekasi.

4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Gambar 3. 4 Dokumentasi Kegiatan Sinergitas Kerukunan Umat Beragama Pemerintah Daerah dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kota Bekasi Tahun 2024



Program ini memiliki satu indikator program yaitu Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya tercapai 100% dari target 100%. Adapun formula indikatornya adalah *jumlah fasilitasi pembinaan ATHG ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani dibagi jumlah ATHG ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang diterima Badan Kesbangpol dikali 100%*. Pada tahun 2024 ini jumlah peserta yang mendapat pembinaan dalam rangka menjaga sinergitas kerukunan umat beragama di Kota Bekasi telah terealisasi 1700 Orang yang telah dilakukan Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Sedangkan cakupan program Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud merupakan peranan atau upaya Badan Kesbangpol, khususnya Bidang yang menangani urusan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam rangka menjaga kondusifitas Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Bekasi. Adapun pembinaan sebagaimana dimaksud, diantaranya :

- a. Fasilitasi Sinergitas tokoh masyarakat Kota Bekasi dengan pemerintah daerah;
- b. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi;
- c. Fasilitasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi;
- d. Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kota Bekasi;

e. Fasilitasi Legalitas Penerbitan Pertimbangan Rumah Ibadah di Kota Bekasi.

5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Gambar 3. 5 Dokumentasi Kegiatan Kewaspadaan Dini dan Deteksi Dini Tahun 2024



Program ini memiliki satu indikator program yaitu Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Daerah tercapai 100% dari target 100%. Adapun formula indikatornya adalah *jumlah fasilitasi penanganan ATHG keamanan daerah yang ditangani dibagi jumlah ATHG keamanan daerah yang diterima Badan Kesbangpol dikali 100%*. Pada tahun 2024 ini jumlah penanganan potensi konflik yang telah diterima oleh Badan Kesbangpol sebanyak 39 Kasus, dan dari keseluruhan kasus tersebut dapat tertangani dengan baik oleh Badan Kesbangpol berserta jajaran unsur terkait dalam melakukan penanganan potensi konflik di Kota Bekasi. Mengenai cakupan program Penanganan Potensi Konflik Daerah sebagaimana dimaksud merupakan peranan atau upaya Badan Kesbangpol, khususnya Bidang yang menangani urusan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam rangka menjaga stabilitas keamanan daerah di Kota Bekasi. Adapun penanganan sebagaimana dimaksud, diantaranya:

- a. Fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah di Kota Bekasi (FKDM, TNI, POLRI, BINDA, KEJAKSAAN, IMIGRASI. dll);
- b. Fasilitasi Forkopimda Kota Bekasi, forum ini diketuai Wali Kota Bekasi dan beranggotakan : Kapolresta, Komandan Kodim, Kepala Kejaksaan Negeri, dan unsur Pimpinan DPRD Kota Bekasi.

- c. Fasilitasi legalitas Surat Keterangan Laporan Orang Asing di Kota Bekasi;
- d. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan perundang undangan terkait Kewaspadaan Dini Daerah di Kota Bekasi;

➤ **Perbandingkan antara Data Kinerja yang telah dilaksanakan Tahun 2024 dengan Tahun lalu.**

IKU 2 : Persentase Kasus SARA yang diselesaikan

Defenisi Operasional :

Jumlah Kasus SARA yang ditangani tahun (n) dibagi Jumlah kasus SARA yang dilaporkan tahun (n) dikalikan 100%.

- o Realisasi Data Kinerja Tahun 2023 s.d 2024 :
 - Jumlah Kasus SARA yang ditangani tahun n-1 (2023) : 2 Kasus
Realisasi Data Kinerja = $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$
 - Jumlah Kasus SARA yang ditangani tahun n (2024) : 1 Kasus
Realisasi Data Kinerja = $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$
- o Sebagaimana definisi operasional dari indikator kinerja ini, bahwa Semakin banyak kasus atau konflik yang terselesaikan, semakin besar pengaruhnya terhadap ketercapaian indikator tersebut. Selanjutnya, perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Kasus SARA yang diselesaikan di Kota Bekasi Tahun 2024 dengan Tahun lalu, sebagaimana tergambar pada tabel 3.8 berikut.

Tabel 3. 8 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja 2024 dengan Tahun lalu (Sasaran Strategis 2)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Persentase Kasus SARA yang diselesaikan	Persen	100	100

(Sumber Data: Renstra Teknokratik Badan Keshangpol 2024-2026)

Berdasarkan penyajian tabel tersebut diatas, dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu tidak ada data perbandingan karena merupakan indikator baru pada Renstra Teknokratik tahun 2024-2026 dan realiasasi target sesuai dengan target yang telah ditentukan.

➤ **Realisasi Kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan target dalam Renstra Teknokratik Kesbangpol 2024-2026.**

Pada awal tahun (2024) Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol Kota Bekasi, ditargetkan Persentase Kasus SARA yang diselesaikan adalah 100%. Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target realisasi kinerja sampai tahun 2026 pada Renstra Teknokratik Badan Kesbangpol Kota Bekasi tahun 2024-2026, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Akhir Renstra-PD (Sasaran Strategis 2)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian s.d Tahun 20224 (%)	Tahun 2024		Capaian Tahun Terakhir Renstra (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100

➤ **Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional (jika ada)**

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 pada Sasaran Strategis 2 (Terwujudnya kerukunan, Toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi) ini dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar atau target nasional (jika ada). Secara khusus untuk IKU pada Sasaran Strategis 2 ini, bahwa pada tingkat nasional tidak terdapat target mengenai indikator kinerja ini sebagaimana tergambar pada tabel 3.10 berikut.

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Target Nasional (Sasaran Strategis 2)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Nasional Tahun 2024
1	Persentase Kasus SARA yang diselesaikan	100%	Tidak Ada

Bahwasanya terhadap standar atau target nasional dalam hal ini dalam urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, bahwa realisasi dan capaian kinerja pada tingkat sasaran strategis ini sangat mendukung atau sejalan dengan program nasional dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam

hal ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Umum, yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 111.790.119.300,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar **Rp. 9.149.542.000,-** dan **Belanja Langsung (BL)** sebesar **Rp. 102.440.577.300,-**. **Belanja Langsung Urusan (BLU)** terdiri dari **Belanja Langsung Urusan (BLU)** dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 8.907.368.860,-** untuk **Belanja Hibah** dianggarkan sebesar **Rp. 90.598.681.700,-** dan **Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)** dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 3.134.526.740,-**. Anggaran tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Program-Program pembangunan Badan Kesbangpol sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Per Program Tahun 2024

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.232.588.740,-	Rp. 12.284.068.740,-
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 2.290.812.860,-	Rp. 2.290.812.860,-
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 8.595.411.700,-	Rp. 8.595.411.700,-
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 80.942.031.000,-	Rp. 84.282.426.000,-
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 1.000.000.000,-
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 3.337.400.000,-	Rp. 3.337.400.000,-
TOTAL		Rp. 108.398.244.300	Rp. 111.790.119.300

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Total Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami perubahan dari Total Pagu Anggaran sebesar **Rp. 108.398.244.300,-** menjadi **Rp. 111.790.119.300,-**. Adapun realisasi anggaran yang dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas;

• Belanja Tidak Langsung	: Rp	8.892.463.853,-
• Belanja Langsung Penunjang Urusan	: Rp	2.199.531.454,-
• Belanja Langsung Urusan	: Rp	6.070.415.238,-
• Belanja Hibah	: Rp	89.751.766.000,-
Jumlah	: Rp	106.914.176.545,-

Secara terperinci, realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL), Belanja Langsung Urusan (BLU), Belanja langsung Penunjang Urusan (BLPU) dan Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024 dan Perbandingan dengan tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Realisasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran		Realisasi (Rp)		Ket (%)		Ket	
2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Program Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00 %	100%	100,00 %	100%	10.079.397.512	12.284.068.740	9.078.207.469	11.091.993.307	90,07	90,30		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	3.000.000	17.000.000	2.960.000	13.625.000	98,67	80,15		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,00 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	17.000.000	2.960.000	13.625.000,00	98,67	80,15	Efisien	Efisien
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%			8.897.620.000	9.127.542.000	7.946.269.130	8.899.213.853	89,31	97,18		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.080,00 Orang/bulan	1.026 Orang/Bulan	976 Orang/Bulan	1026 Orang/Bulan	8.894.620.000	9.149.542.000	7.943.269.130	8.892.463.853,00	89,30	97,19	Efisien	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18,00 Laporan	17 Laporan	18 Laporan	17 Laporan	3.000.000	8.000.000	3.000.000	6.750.000,00	100,00	84,38	Efisien	Efisien
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00 %	100%	100,00 %	100%								
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%			20.000.000	484.927.780	20.000.000	304.698.000	100,00	62,83	Efisien	Efisien
	Pengadaan Pakas Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakas Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		2 Paket		2 Paket		200.000.000		136.750.000,00		68,38	Efisien	Efisien
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8,00 Orang	12 Orang	8 Orang	0 Orang	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	100,00	0,00	Efisien	Tidak Efisien
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang		48 Orang		264.927.780		167.948.000,00		63,39	Efisien	Efisien
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	100,00%	100,00 %	100%								
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%			330.000.000	947.781.750	303.345.751	563.888.609	91,92	59,49		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3,00 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	170.000.000	350.000.000	152.289.000	322.475.200,00	89,56	92,25	Efisien	Efisien
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2,00 Paket	12 Paket	2 Paket	12 Paket	30.000.000	75.000.000	30.000.000	41.780.000,00	100,00	55,71	Efisien	Efisien
Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3,00 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	50.000.000	18.370.000	21.362.500,00	91,85	42,73	Efisien	Efisien

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Realisasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Page Anggaran		Realisasi (Rp)		Ket (%)		Ket	
2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	422.781.750	92.866.751	153.225.309,00	92,87	36,24	Efisien	Efisien
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250,00 Dokumen	12 Dokumen	250 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	50.000.000	9.820.000	24.614.600,00	98,20	49,23	Efisien	Efisien
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %								
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %			0	510.218.250	0	292.040.000		57,24		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		34 Unit		34 Unit		510.218.250		292.040.000,00		57,24	Efisien	Efisien
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %								
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %			548.777.613	514.598.950	540.381.590	507.017.960	98,47	98,53		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	548.777.613	514.598.950	540.381.590	507.017.960,00	98,47	98,53	Efisien	Efisien
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %			280.000.000	652.000.000	265.250.998	511.541.885	94,73	78,46		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22,00 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	250.000.000	377.000.000	235.250.998	309.959.885,00	94,10	82,22	Efisien	Efisien
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25,00 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	30.000.000	75.000.000	30.000.000	37.340.000,00	100,00	49,79	Efisien	Efisien
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit		1 Unit		200.000.000		164.242.000,00		82,12	Efisien	Efisien
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	50 %	100,00 %	50 %	100,00 %	2.611.580.860	2.290.812.860	2.373.801.860	1.663.360.738	90,90	72,61		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Masyarakat Kota Bekasi	Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	100 %	100 %	2.611.580.860	2.290.812.860	2.373.801.860	1.663.360.738	90,90	72,61		
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	840 Orang	1.620 Orang	840 Orang	510 Orang	2.011.580.860	2.290.812.860	2.373.801.860	1.663.360.738,00	90,90	72,61	Efisien	Efisien

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Realisasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Page Anggaran		Realisasi (Rp)		Kru (%)		Ket	
2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pembinaan Politik Daerah	Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah	5%	100,00 %	5%	100,00 %	61.148.826,00	84.282.426.000	55.674.496,58	83.219.113.300	91,05	98,74		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah Masyarakat yang mendapat Pembinaan Politik di Kota Bekasi	Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah	100%	100%	100%	100%	61.148.826,00	84.282.426.000	55.674.496,58	83.219.113.300	91,05	98,74		
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Da	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Da	11 Dokumen	21 Dokumen	11 Dokumen	21 Dokumen	59.867.790,00	82.748.270.000	54.930.051,18	82.421.766.000,00	91,75	99,61	Efisien	Efisien
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	2.260 Orang	2.400 Orang	2260 Orang	2168 Orang	1.246.880.000	1.500.000.000	744.445.400	797.347.500,00	59,70	53,16	Efisien	Efisien
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peman	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peman	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	34.156.000	34.156.000	0	0	0,00	0,00	Tidak Efisien	Tidak Efisien
Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Dan Pengembangan	Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	Optimalisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	9.255.000.000	8.595.411.700	8.740.330.000	7.864.324.500	94,44	91,73		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Realisasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Page Anggaran		Realisasi (Rp)		Kru (%)		Ket	
2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	Organisasi Kemasyarakatan														
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan terbita administrasi di Kota Bekasi	Optimalisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	9.255.000.000	8.595.411.700	8.740.230.000	7.884.324.500	94,44	91,73		
Pengrusakan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pengrusakan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Distatun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	26 Dokumen	41 Dokumen	24 Dokumen	37 Dokumen	8.955.000.000	7.850.411.700	8.605.000.000	7.330.000.000,00	96,09	93,37	Efisien	Risiken
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	300 Orang	300 Orang	325 Orang	300.000.000	745.000.000	135.230.000	554.324.500,00	45,08	74,41	Efisien	Efisien
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Cakupan Masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya	Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0,17 %	100%	0,17 %	100%	800.000.000	1.000.000.000	661.083.000	788.962.000	82,64	78,90		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Bekasi	Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	100%	100%	800.000.000	1.000.000.000	661.083.000	788.962.000	82,64	78,90		
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.250 Orang	1.700 Orang	1250 Orang	2450 Orang	800.000.000	1.000.000.000	661.083.000	788.962.000,00	82,64	78,90	Efisien	Efisien
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan	Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Daerah	100%	100%	100%	100%	1.495.200.000	3.337.400.000	1.335.081.000	2.266.420.500	89,29	67,91		
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kota Bekasi	Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Daerah	100%	100%	100%	100%	1.495.200.000	3.337.400.000	1.335.081.000	2.266.420.500	89,29	67,91		
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan	400 Orang	400 Orang	400 Orang	280 Orang	845.200.000	845.200.000	748.731.000	569.586.000,00	88,59	67,39	Efisien	Efisien

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Realisasi Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran		Realisasi (Rp)		Ker (%)		Ket	
2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bidang Kewaspadaan, serta Penanggulangan	Bidang Kewaspadaan, serta Penanggulangan												
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta P	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta P	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	656.000.000	537.200.000	586.350.000	496.832.500,00	90,21	92,49	Efisien	Efisien
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		12 Dokumen		12 Dokumen		1.955.000.000		1.200.000.000,00		61,38	Efisien	Efisien
Total								85.390.004,473	111.790.119,300	77.862.899,918	106.914.176,548	90,21	95,64	Efisien	Efisien

Beberapa catatan analisis pembiayaan tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. **26.400.114.827,-**. Adapun pada tahun 2024 Badan Kesbangpol kota Bekasi telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran dari total pagu sebesar Rp. **111.790.119.300,-** menjadi Rp. **106.914.176.545,-**. Badan Kesbangpol berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp. **4.875.942.755,-** atau 3.39% dari total anggaran. Upaya efisiensi ini dilakukan untuk memastikan pembelanjaan anggaran yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan pencapaian target kinerja.

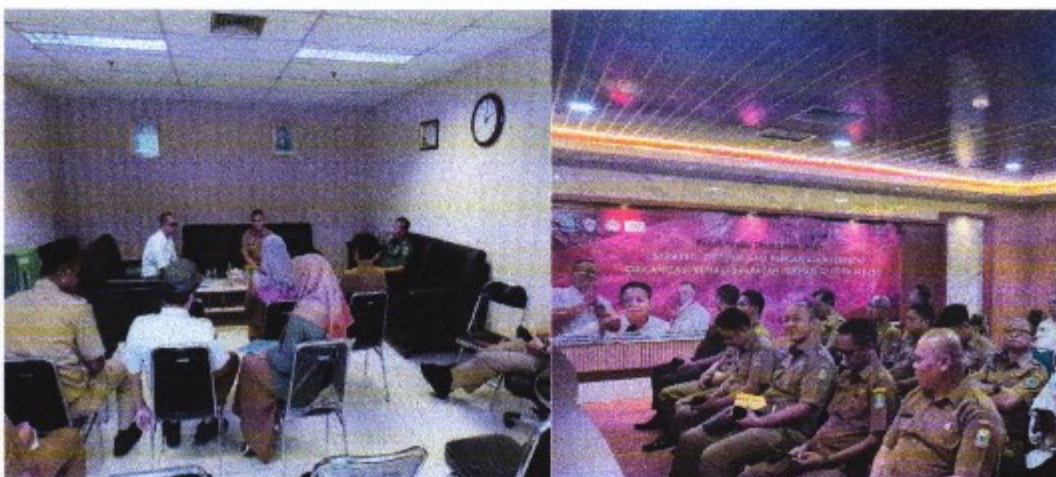
Untuk kedepannya efisiensi anggaran juga akan mempertimbangkan efektifitas pencapaian *Zero Accident* di dalam pengelolaan urusan Pemerintahan Umum di Kota Bekasi yang memiliki target tinggi. Oleh karena itu, Badan Kesbangpol memerlukan sumber daya anggaran dan manusia yang kompeten untuk mencapai target tujuan yang telah ditetapkan.

3.4 INOVASI

Tantangan global dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut perangkat daerah untuk beradaptasi secara dinamis dan berpikir kreatif. Permasalahan serta keterbatasan sumber daya seharusnya dipandang sebagai pendorong untuk menciptakan gagasan dan ide-ide inovatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2024 ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi telah melakukan berbagai inovasi, antara lain:

a) Membentuk Tim Pengawasan Terpadu Organisasi Kemasyarakatan (Tepok Tangan) di Kota Bekasi

Gambar 3. 6 Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Terpadu Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bekasi Tahun 2024



Pengawasan terhadap organisasi masyarakat (ormas) memiliki manfaat yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan integritas ormas, serta untuk kepentingan masyarakat dan negara. Dengan adanya pengawasan, ormas dapat memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mencegah tindakan ilegal dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, pengawasan juga meningkatkan akuntabilitas ormas, mendorong transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan dana, serta memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota dan masyarakat. Lebih jauh lagi, pengawasan yang efektif dapat mencegah penyimpangan dan korupsi, serta meningkatkan kualitas kegiatan yang dilaksanakan, sehingga membangun kepercayaan publik terhadap ormas. Ketika ormas didorong untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berkualitas, masyarakat pun akan lebih bersedia untuk berpartisipasi dan mendukung. Selain itu, pengawasan juga berperan penting dalam mencegah radikalisasi dan ekstremisme, serta mendukung pembangunan sosial dengan memastikan bahwa ormas tetap fokus pada tujuan yang positif dan konstruktif bagi masyarakat. Dengan demikian, pengawasan ormas sangat krusial untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan negara. Penyelenggaraan pengawasan Ormas ini dilakukan secara kolaboratif oleh Badan Kesbangpol dan beberapa stakeholder terkait.

b) Fasilitasi kegiatan Kerukunan Umat Beragama (KUB)

Gambar 3. 7 Dokumentasi Fasilitasi Kegiatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bekasi Tahun 2024



Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) para pemuka agama di Kota Bekasi diadakan setiap tahun sebagai upaya untuk menjaga kerukunan umat beragama. Dalam FGD ini, para pemuka agama dari berbagai latar belakang

berkumpul untuk berdiskusi dan berbagi pandangan mengenai pentingnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, organisasi keagamaan, dan tokoh masyarakat, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antaragama dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Badan Kesbangpol Kota Bekasi berperan penting dalam menyelenggarakan kegiatan ini, dengan mengkoordinasikan berbagai pihak dan memastikan bahwa diskusi berjalan dengan baik.

Melalui kegiatan FGD ini, para peserta dapat saling memahami perbedaan dan mencari solusi untuk mengatasi potensi konflik. FGD juga menjadi platform untuk menyampaikan pesan-pesan damai dan nilai-nilai kebersamaan yang terkandung dalam Pancasila. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerukunan dan mendorong kolaborasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi semua. Secara keseluruhan, FGD para pemuka agama di Kota Bekasi, yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol, berperan penting dalam membangun masyarakat yang toleran dan saling menghormati, serta menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman yang ada. Dengan dukungan dari Badan Kesbangpol, diharapkan kerukunan antarumat beragama dapat terus terjaga dan diperkuat, menciptakan Kota Bekasi sebagai contoh bagi daerah lain dalam menciptakan harmoni sosial.

3.5 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

- a) Peringkat ke-dua Kategori penghargaan Kota Toleran se-Indonesia yang diraih oleh Kota Bekasi di Tahun 2024

Gambar 3. 8 Dokumentasi Penghargaan Kota Bekasi Peringkat ke-2 sebagai Kota Toleran se-Indonesia di Tahun 2024



Kota Bekasi meraih penghargaan sebagai kota toleran berdasarkan Indeks Kota Toleran (IKT) 2023, di mana kota ini berhasil menduduki peringkat kedua dari sepuluh kota se-Indonesia dengan skor 6,460. Penghargaan ini diberikan oleh Setara Institute sebagai pengakuan atas komitmen Kota Bekasi dalam menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama. Di bawah kepemimpinan Pj Wali Kota Bekasi, Kota Bekasi menunjukkan dedikasi untuk menjaga Kebhinekaan Tunggal Ika, serta berusaha menciptakan lingkungan yang harmonis tanpa membedakan suku, ras, dan agama.

Kegiatan kolaboratif seperti Focus Group Discussion (FGD) yang intensif dengan melibatkan pemerintah daerah, pemuka agama, dan tokoh masyarakat berperan penting dalam memperkuat hubungan antaragama baik yang diselenggarakan dan di fasilitasi oleh Badan Kesbangpol atau FKUB Kota Bekasi. Diskusi ini tidak hanya membantu saling memahami perbedaan, tetapi juga mencari solusi untuk potensi konflik dan menyampaikan pesan damai. Dengan dukungan dari semua elemen masyarakat, Kota Bekasi berhasil menciptakan lingkungan yang nyaman dan damai untuk menjalankan norma agama, menjadikannya contoh bagi daerah lain dalam menciptakan kerukunan dan toleransi.

3.6 KOLABORASI LINTAS SEKTOR

Keberhasilan Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama beberapa pihak. Pihak-pihak ini berasal dari berbagai instansi serta perwakilan tokoh masyarakat di Kota Bekasi. Untuk mempermudah pelaksanaan tugas, dibentuklah tim dan forum, antara lain:

a) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi

FKUB merupakan forum lintas agama yang dibentuk untuk melakukan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama dan membina serta memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah. FKUB Kota Bekasi dibentuk melalui Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 450/Kep.130 -Kesbangpol/III/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 450/Kep.412-Kesbangpol/VIII/2021 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi Masa Bakti 2021-2026.

b) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Bekasi

FPK dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 341/Kep.246.A.Kesbangpol/IV/2020 dan memiliki fungsi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat rentan terhadap konflik melalui pembauran antar suku agar fanatisme kesukuan tidak memicu konflik.

c) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Bekasi

Untuk mengatasi gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat maka dibentuklah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. FKDM Kota Bekasi dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Ke.75.A-Kesbangpol/II/2021. Pembentukan FKDM dimaksudkan untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui upaya deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala suatu peristiwa.

d) Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kota Bekasi

Tim Kewaspadaan Dini di dalamnya termasuk Komunitas Intelejen Daerah merupakan komunitas yang bertugas mengkoordinasikan, menyusun dan melakukan kegiatan perencanaan umum dalam pelaksanaan operasional kegiatan intelejen, selain itu juga menggali atau mengumpulkan informasi sebanyak banyaknya dari seluruh kota tentang segala sesuatu yang berpotensi mempengaruhi stabilitas dan kondusivitas kota Bekasi. Komunitas ini terdiri dari beberapa lembaga/instansi diantaranya Polresta, Kesbangpol, Satpol PP, Kodim, BIN dan Kejari. Selain itu tim ini juga bisa memberi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan informasi dini terhadap ancaman di daerah.

e) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Bekasi

Forkopimda merupakan Forum Koordinasi antar pimpinan lembaga yang ada di Kota Bekasi, forum ini diketuai Walikota Bekasi dan beranggotakan, Kapolresta, Komandan Kodim, Kepala Kejaksaan Negeri, dan unsur Pimpinan DPRD Kota Bekasi. Forkompida ini dibentuk dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 200.1.1/Kep.103-Kesbangpol/I/2024, untuk mengkoordinasikan dan membahas masalah pemerintahan umum di suatu daerah atau kota, dan menghasilkan kebijakan atau keputusan yang bisa didukung oleh seluruh komponen dalam pelaksanaannya, dan menjamin terlaksananya pemerintahan umum di kota Bekasi.

Tabel 3. 13 Renja Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Kode	KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021				KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5- 1317 TAHUN 2023				Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2025		Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Target Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	Pagu Indikatif Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah							
7	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			111,790,119,900						46,615,263,760				
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	12,284,068,740				100 %	13,535,520,760				
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	17,000,000				100 %	175,000,000				
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0				1 Dokumen	150,000,000				
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	17,000,000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	1 Laporan	25,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100 %	9,157,542,000				100 %	10,469,513,000				
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.026 Orang/Bulan	9,149,542,000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggejajan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	1064 Orang/bulan	10,454,513,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	

Kode					KEPMENDAGRI NOMOR 050-SBB9 TAHUN 2021	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5- 1317 TAHUN 2023	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2025		Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	Pagu Indikatif Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
8	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	8,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	16 Laporan	15,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
							Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %						100 %				
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	484,927,780					100 %	500,000,000			
8	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	200,000,000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	50 Paket	200,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	20,000,000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	10 Orang	50,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang	50 Orang	264,927,780	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	52 Orang	250,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
							Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %							100 %			
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	947,781,750						100 %	1,075,000,000		
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	350,000,000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Mangajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	3 Paket	350,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	

Kode					KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5- 1317 TAHUN 2023	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2025		Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	Pagu Indikatif Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target			Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
								Pelayanan Publik									
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	75,000,000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	12 Paket	75,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
6	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	50,000,000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	2 Dokumen	50,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	0	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	12 Laporan	150,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	422,781,750	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	12 Laporan	350,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50,000,000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	12 Dokumen	100,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	510,218,250					100 %	300,000,000		
8	01	01	2.07	5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	510,218,250	Kota Bekasi, Bekasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Pendukung Prioritas	23 Unit	300,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan

Kode					KEPMENDAGRI NOMOR 050-S889 TAHUN 2021	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5- 1317 TAHUN 2023	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2025		Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	Pagu Indikatif Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Selatan, Margajaya		Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Daerah Lainnya				Bangsa Dan Politik
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	514,598,960					100 %	516,007,760		
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	514,598,960	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	12 Laporan	516,007,760	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %						100 %			
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	652,000,000					100 %	500,000,000		
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	377,000,000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	22 Unit	400,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	75,000,000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	25 Unit	100,000,000	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200,000,000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya		0	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode				KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5- 1317 TAHUN 2023	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2025		Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	Pagu Indikatif Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
8	1	2		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Optimalisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100 %	2,290,812,860				100 %	2,812,569,800			
8	1	2	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1.620 Orang	2,290,812,860				200 Orang	896,130,000			
						Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		-	0				354 Orang	580,940,500			
						Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakan dan pumapaskibraka		-	0				2 Dokumen	181,762,000			
						Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka		-	0				52 Orang	1,153,737,300			
8	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.620 Orang	2,290,812,860	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	200 Orang	696,130,000	Pelajar dan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	2	2.01	4		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	354 Orang	580,940,500	Pelajar dan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	2	2.01	7		Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Pumapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Pumapaskibraka	-	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	2 Dokumen	181,762,000	Pelajar dan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode					KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5- 1317 TAHUN 2023	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2025		Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	Pagu Indikatif Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target			Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												Pelayanan Publik					
8	1	2	2.01	8		Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	-	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Politik hankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	52 Orang	1,153,737,300	Pelajar dan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Optimalisasi Pembinaan Politik Daerah	100%	84,282,426,000					100%	15,229,773,200		
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	21 Dokumen	82,748,270,000					12 Dokumen	14,479,773,200		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.400 Orang	1,500,000,000					1504 Orang	750,000,000		
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	12 Laporan	34,156,000					-	0		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode					KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5- 1317 TAHUN 2023	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2025		Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	Pagu Indikatif Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target			Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
							Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit										
8	1	3	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	21 Dokumen	82,748,270,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	12 Dokumen	14,479,773.200	Lembaga pemerintah, Partai Politik, Pelajar dan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.400 Orang	1,500,000,000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	1504 Orang	750,000,000	Lembaga pemerintah, Partai Politik, Pelajar dan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peman	12 Laporan	34,156,000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	-	0	Lembaga pemerintah, Partai Politik, Pelajar dan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode					KEPMENDAGRI NOMOR 950-SBB9 TAHUN 2021	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5- 1317 TAHUN 2023	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2025		Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	Pagu Indikatif Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target			Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Optimalisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	8,595,411,700					100 %	9,800,000,000		
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	41 Dokumen	7,850,411,700					51 Dokumen	9,000,000,000		
							Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	745,000,000					400 Orang	800,000,000		
8	1	4	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	41 Dokumen	7,850,411,700	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	51 Dokumen	9,000,000,000	Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	745,000,000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMJUM- DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	400 Orang	800,000,000	Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Optimalisasi pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	1,000,000,000					100 %	1,400,000,000		
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.700 Orang	1,000,000,000					1500 Orang	1,400,000,000		

Kode					KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5- 1317 TAHUN 2023	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2025		Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	Pagu Indikatif Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.700 Orang	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	1900 Orang	1,400,000,000	Pelajar, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Stakeholder terkait	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Daerah	100 %	3,337,400,000					100 %	3,637,400,000		
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang	845,200,000					250 Orang	845,200,000		
							Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	537,200,000					12 Laporan	537,200,000		
							Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1,955,000,000					12 Dokumen	2,455,000,000		
8	1	6	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan	400 Orang	845,200,000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	250 Orang	845,200,000	Stakeholder terkait dan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode					KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021	KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5- 1317 TAHUN 2023	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2025		Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	Pagu Indikatif Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
					Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Semua Kelurahan		Transformasi Pelayanan Publik					
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	537,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan	12 Laporan	537,200,000	Forum Bentukan Pemerintah, Stakeholder terkait, dan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1,955,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan	12 Dokumen	2,455,000,000	Forum Bentukan Pemerintah, Stakeholder terkait, dan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL									111,790,119,300						46,615,263,760		

4

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bansa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2024.

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Bakesbangpol Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome ingin dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerja.

Upaya penciptaan kesatuan dan keutuhan bangsa agar tetap harmonis di Kota Bekasi dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran Bakesbangpol yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Teknokratik Tahun 2024-2026. Melihat hasil dari analisis evaluasi kinerja diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Bakesbangpol Kota Bekasi secara keseluruhan dari 2 (dua) Sasaran Strategis, dimana seluruh sasaran dapat mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan.

4.2 KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Alokasi anggaran Bakesbangpol Kota Bekasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 111.790.119.300,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 8.892.463.853,- Belanja Langsung Urusan (BLU) Rp. 6.070.415.238,- Belanja Hibah Rp. 89.751.766.000,- Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2024 dengan realisasi keuangan 96% dan realisasi fisik Kegiatan 98,43%. Dalam proses pelaksanaan penganggaran yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol di tahun 2024 mengalami perubahan anggaran yang lumayan signifikan pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT), salah satu dasar dilakukan Anggaran Perubahan pada tahun 2024 yaitu karena ada catatan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) terkait dengan adanya

penambahan pagu anggaran untuk memfasilitasi pelaksanaan Pemilukada di tahun 2024 dan juga memperhatikan kondisi actual dan penyesuaian kebijakan pemerintah pusat berkenaan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9000.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dalam point C Nomor 2 (a) dan (b) yang berisikan tentang prosentase penganggaran Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD; dan
- b. Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Dengan dasar Surat Edaran tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menyesuaikan NPHD kepada Lembaga yang menjadi penyelenggara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tahun 2024, sebagaimana berikut :

- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Bekasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Nomor : 774/Kesbangpol.Poldagri dan Nomor : 593/PR.08-PKS/3275/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tahun 2024, dengan rincian :
 - Dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tahun 2024 pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 36.496.000.000,-
 - Dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 54.744.000.000,-Jumlah Total Dana KPU pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 91.240.000.000,-
- b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Bekasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bekasi, Nomor : 775/Kesbangpol.Poldagri dan Nomor : 79/HK.02/K.JB-21/11/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024, dengan rincian :
 - Dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 9.506.585.000,-

- Dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 12.728.388.000,-

Jumlah Total Dana BAWASLU pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 sebesar Rp. 22.234.973.000,-

Adanya perubahan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

4.3 RENCANA TINDAK

Untuk Tahun Anggaran 2024 Bakesbangpol Kota Bekasi berupaya untuk meyakinkan kepada pemilik anggaran daerah untuk lebih memprioritaskan program-program pembangunan yang ada di Bakesbangpol Kota Bekasi, khususnya di tahun 2024 terdapat urgensi Bakesbangpol dalam proses penyelenggaraan pemilu di level pemerintah daerah merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan antar perangkat daerah, dan memfasilitasi lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian tugas Bakesbangpol lebih memprioritaskan dalam giat sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat, serta memantau potensi konflik selama proses pemilu. Diharapkan kerjasama dan koordinasi yang baik, akan tercipta pemilu yang dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai.

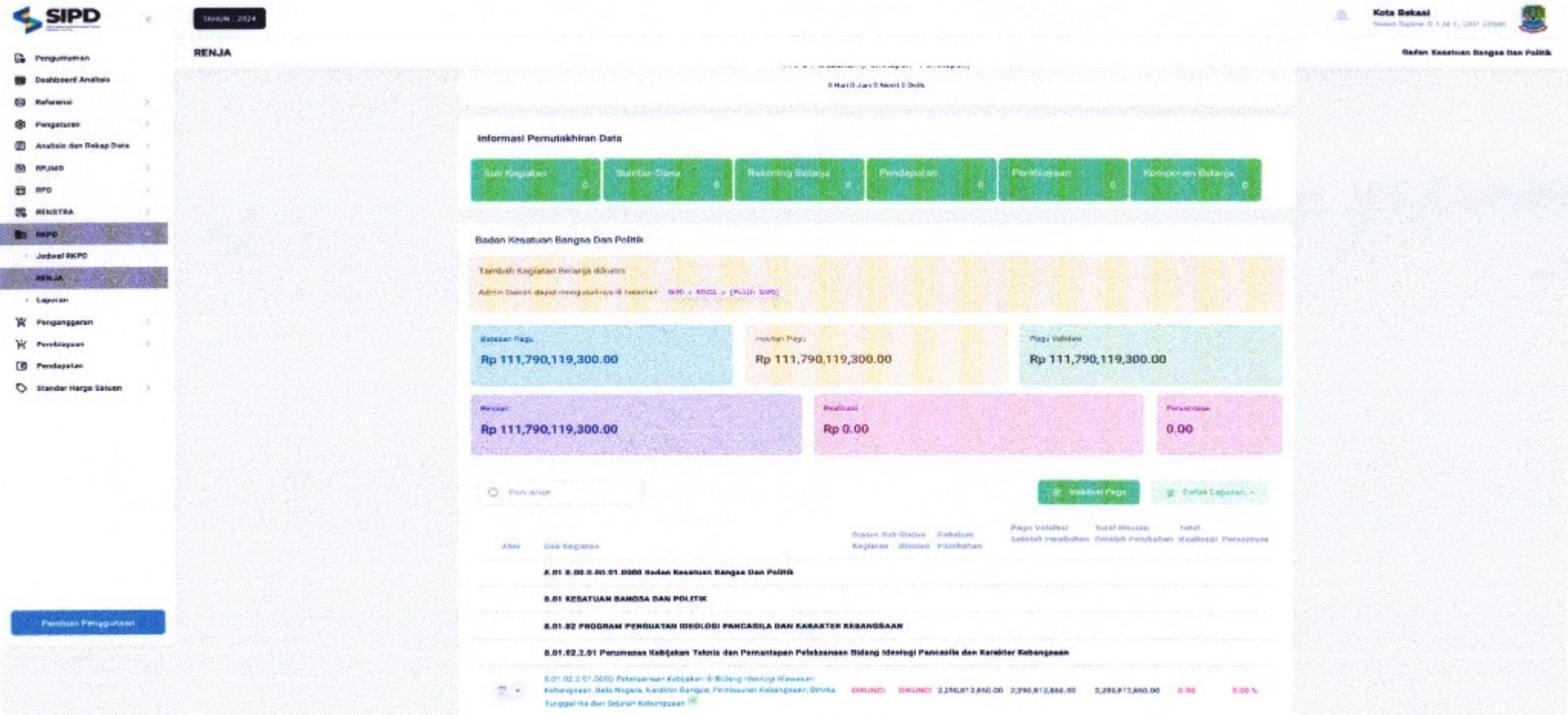
Kendala utama yang dihadapi Bakesbangpol Kota Bekasi di dalam melaksanakan tupoksinya adalah membangun persepsi yang sama dengan entitas perencanaan anggaran daerah bahwa fungsi kesatuan bangsa dan politik adalah fungsi yang penting di dalam menunjang stabilitas pembangunan di Kota Bekasi. Dengan adanya persepsi yang sama maka alokasi penganggaran akan menempatkan Bakesbangpol sebagai perangkat daerah yang memiliki skala prioritas tertentu di dalam mendukung pembangunan daerah.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian sasaran perangkat daerah untuk menekan gesekan-gesekan sosial dan potensi konflik yang mungkin terjadi.
- b. Mengintensifkan deteksi dini dan cegah dini potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai metode.
- c. Meningkatkan toleransi, hormat menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat untuk kerukunan dan keutuhan bangsa dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai tokoh agama, pemuda daerah dan lintas suku.

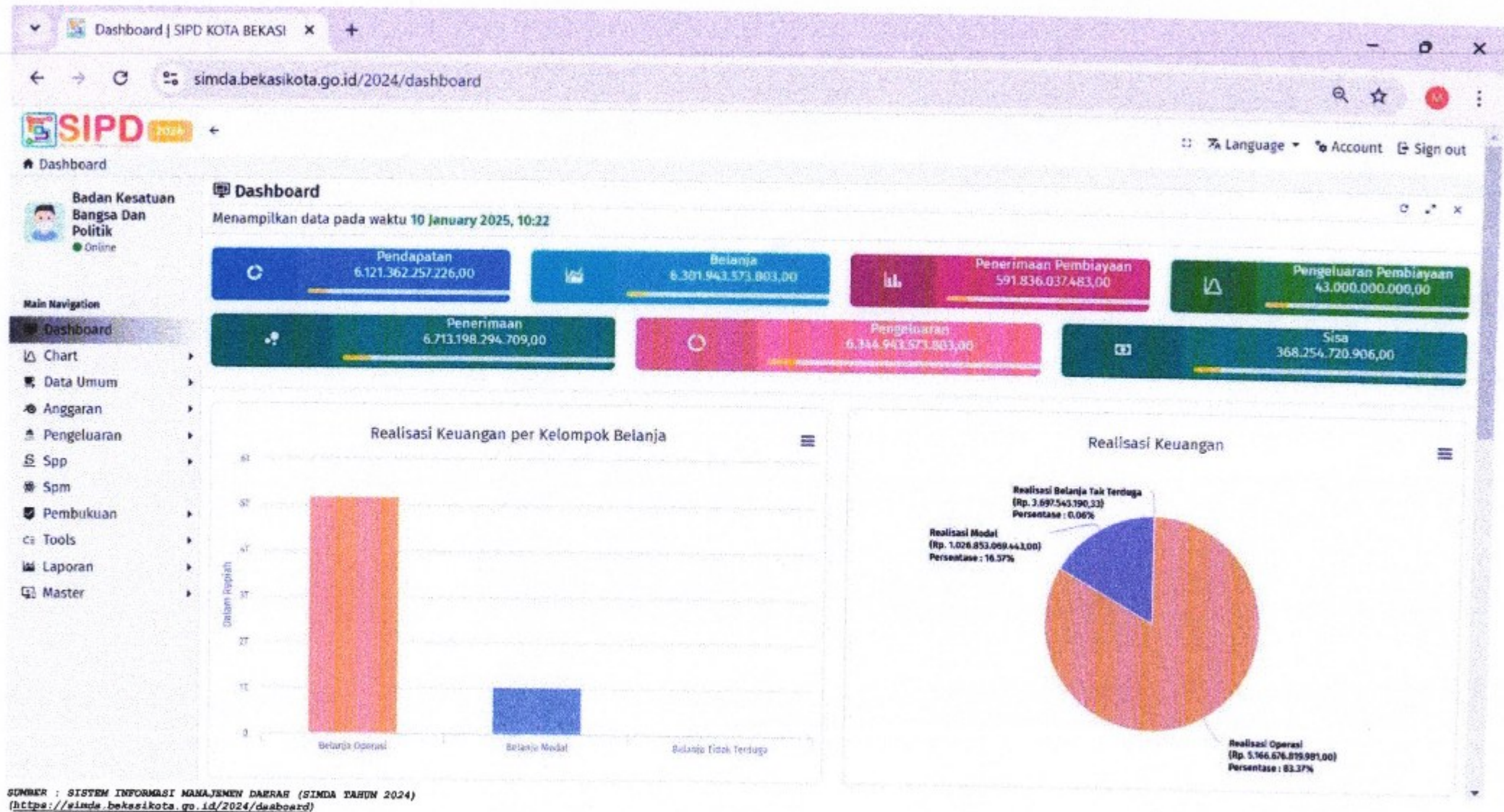
- d. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi terutama ke sekolah-sekolah melalui pendidikan, FGD, perlombaan maupun pengkaderan.
- e. Meningkatkan peran media sosial sebagai sarana diseminasi dan sosialisasi mengenai etika politik, ideologi wawasan kebangsaan, kerukunan umat beragama dan antar suku bangsa agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat luas, sehingga tercipta kondusifitas dan stabilitas daerah.

DATA BUKTI PENDUKUNG AKUNTABILITAS ANGGARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2024



SUMBER : SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) TAHUN 2024 PADA PAGU ANGGARAN PERUBARAN BAKESBANGPOL (https://sind-ci.kemendagri.go.id/penganggaran/anggaran/cascading/belanja?id_skep=903)

[illegible]





**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP BELANJA
SKPD**

**PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Organisasi : 8-01.0-00.0-00.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8-01.0-00.0-00.01.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Rekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Belanja Berdasarkan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			108.398.244.300,00	111.790.119.300,00	3.391.875.000,00	3,13
4.12	Kesatuan Bangsa dan Politik			108.398.244.300,00	111.790.119.300,00	3.391.875.000,00	3,13
4.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			12.232.588.740,00	12.284.068.740,00	51.480.000,00	0,42
4.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
4.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SILPA;	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
4.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.106.062.000,00	9.157.542.000,00	51.480.000,00	0,57
4.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pendapatan Asli Daerah (P A D); Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.098.062.000,00	9.149.542.000,00	51.480.000,00	0,57
4.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH);	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
4.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			484.927.780,00	484.927.780,00	0,00	0,00
4.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pendapatan Asli Daerah (P A D);	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
4.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SILPA;	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	264.927.780,00	264.927.780,00	0,00	0,00
4.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			947.781.750,00	947.781.750,00	0,00	0,00
4.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SILPA;	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00
4.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SILPA;	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
4.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SILPA;	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
4.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SILPA;	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	422.781.750,00	422.781.750,00	0,00	0,00
4.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SILPA;	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
4.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			510.218.250,00	510.218.250,00	0,00	0,00
4.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	510.218.250,00	510.218.250,00	0,00	0,00
4.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			514.598.960,00	514.598.960,00	0,00	0,00
4.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pendapatan Asli Daerah (P A D);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	514.598.960,00	514.598.960,00	0,00	0,00
4.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			652.000.000,00	652.000.000,00	0,00	0,00
4.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SILPA;	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	377.000.000,00	377.000.000,00	0,00	0,00
4.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
4.12.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan			2.290.812.860,00	2.290.812.860,00	0,00	0,00
4.12.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			2.290.812.860,00	2.290.812.860,00	0,00	0,00
4.12.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pendapatan Asli Daerah (P A D);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.290.812.860,00	2.290.812.860,00	0,00	0,00
4.12.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			80.942.031.000,00	84.282.426.000,00	3.340.395.000,00	4,13
4.12.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			80.942.031.000,00	84.282.426.000,00	3.340.395.000,00	4,13
4.12.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	SILPA; Dana Cadangan;	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.407.875.000,00	82.748.270.000,00	3.340.395.000,00	4,21
4.12.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pendapatan Asli Daerah (P A D);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
4.12.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pendapatan Asli Daerah (P A D);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.156.000,00	34.156.000,00	0,00	0,00
4.12.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			8.595.411.700,00	8.595.411.700,00	0,00	0,00
4.12.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			8.595.411.700,00	8.595.411.700,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4.12.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pendapatan Asli Daerah (P A D);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.850.411.700,00	7.850.411.700,00	0,00	0,00
4.12.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pendapatan Asli Daerah (P A D);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	745.000.000,00	745.000.000,00	0,00	0,00
4.12.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
4.12.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
4.12.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan: Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Provinsi);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
4.12.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial			3.337.400.000,00	3.337.400.000,00	0,00	0,00
4.12.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			3.337.400.000,00	3.337.400.000,00	0,00	0,00
4.12.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	SILPA;	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	845.200.000,00	845.200.000,00	0,00	0,00
4.12.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	SILPA;	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	537.200.000,00	537.200.000,00	0,00	0,00
4.12.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	SILPA;	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.955.000.000,00	1.955.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL ANGGARAN				108.398.244.300,00	111.790.119.300,00	3.391.875.000,00	3,13

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									Formulir RKA BELANJA SKPD
	PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2024									
Organisasi : 8-01.0-00.0-00.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Sub Unit Organisasi : 8-01.0-00.0-00.01.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik										
Rekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Berdasarkan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Jumlah						
				T - 1	T				T + 1	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			0,00	111.270.794.050,00	519.325.250,00	0,00	0,00	111.790.119.300,00	0,00
8.1	Kesatuan Bangsa dan Politik			0,00	111.270.794.050,00	519.325.250,00	0,00	0,00	111.790.119.300,00	0,00
8.1.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			0,00	11.764.743.490,00	519.325.250,00	0,00	0,00	12.284.068.740,00	0,00
8.1.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00
8.1.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SILPA;	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00
8.1.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0,00	9.157.542.000,00	0,00	0,00	0,00	9.157.542.000,00	0,00
8.1.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pendapatan Asli Daerah (P A D); Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.149.542.000,00	0,00	0,00	0,00	9.149.542.000,00	0,00
8.1.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH);	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
8.1.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00	484.927.780,00	0,00	0,00	0,00	484.927.780,00	0,00
8.1.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pendapatan Asli Daerah (P A D);	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Jumlah						
				T - 1	T					T + 1
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SILPA;	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
8.1.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH);	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	264.927.780,00	0,00	0,00	0,00	264.927.780,00	0,00
8.1.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			0,00	936.732.750,00	11.049.000,00	0,00	0,00	947.781.750,00	0,00
8.1.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SILPA;	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00
8.1.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SILPA;	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00
8.1.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SILPA;	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
8.1.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SILPA;	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	422.781.750,00	0,00	0,00	0,00	422.781.750,00	0,00
8.1.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SILPA;	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	0,00	38.951.000,00	11.049.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
8.1.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00	1.942.000,00	508.276.250,00	0,00	0,00	510.218.250,00	0,00
8.1.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.942.000,00	508.276.250,00	0,00	0,00	510.218.250,00	0,00
8.1.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0,00	514.598.960,00	0,00	0,00	0,00	514.598.960,00	0,00
8.1.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pendapatan Asli Daerah (PAD);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	514.598.960,00	0,00	0,00	0,00	514.598.960,00	0,00
8.1.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0,00	652.000.000,00	0,00	0,00	0,00	652.000.000,00	0,00

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Jumlah						
				T - 1	T					T + 1
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SILPA;	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	0,00	377.000.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000.000,00	0,00
8.1.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00
8.1.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
8.1.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan			0,00	2.290.812.860,00	0,00	0,00	0,00	2.290.812.860,00	0,00
8.1.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			0,00	2.290.812.860,00	0,00	0,00	0,00	2.290.812.860,00	0,00
8.1.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pendapatan Asli Daerah (P A D);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.290.812.860,00	0,00	0,00	0,00	2.290.812.860,00	0,00
8.1.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			0,00	84.282.426.000,00	0,00	0,00	0,00	84.282.426.000,00	0,00
8.1.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			0,00	84.282.426.000,00	0,00	0,00	0,00	84.282.426.000,00	0,00
8.1.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	SILPA; Dana Cadangan;	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	82.748.270.000,00	0,00	0,00	0,00	82.748.270.000,00	0,00
8.1.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pendapatan Asli Daerah (P A D);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Jumlah						
				T - 1	T					T + 1
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pendapatan Asli Daerah (P A D);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	34.156.000,00	0,00	0,00	0,00	34.156.000,00	0,00
8.1.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			0,00	8.595.411.700,00	0,00	0,00	0,00	8.595.411.700,00	0,00
8.1.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			0,00	8.595.411.700,00	0,00	0,00	0,00	8.595.411.700,00	0,00
8.1.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pendapatan Asli Daerah (P A D);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.850.411.700,00	0,00	0,00	0,00	7.850.411.700,00	0,00
8.1.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pendapatan Asli Daerah (P A D);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	745.000.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000.000,00	0,00
8.1.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya			0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
8.1.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
8.1.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	[DANA KHUSUS] - Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Provinsi);	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
8.1.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial			0,00	3.337.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.337.400.000,00	0,00
8.1.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			0,00	3.337.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.337.400.000,00	0,00

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Jumlah						
				T - 1	T					T + 1
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	SILPA;	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	845.200.000,00	0,00	0,00	0,00	845.200.000,00	0,00
8.1.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	SILPA;	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	537.200.000,00	0,00	0,00	0,00	537.200.000,00	0,00
8.1.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	SILPA;	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.955.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.955.000.000,00	0,00
TOTAL ANGGARAN				0,00	111.270.794.050,00	519.325.250,00	0,00	0,00	111.790.119.300,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BEKASI
REALISASI BELANJA PER SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024
Periode : 01 January 2024 s/d 31 December 2024

Urusan Pemerintahan : 4.12 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik
Unit Organisasi : 4.12.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 4.12.01.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI							SISA ANGGARAN
			OPERASI			MODAL	BTT	TOTAL	%	
			PEGAWAI	BARANG & JASA	LAINNYA					
4.12.4.12.01.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.284.068.740,00	8.892.463.853,00	1.907.491.454,00	0,00	292.040.000,00	0,00	11.091.995.307,00	90,30	1.192.073.433,00
4.12.4.12.01.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.000.000,00	0,00	13.625.000,00	0,00	0,00	0,00	13.625.000,00	80,15	3.375.000,00
4.12.4.12.01.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.000.000,00	0,00	13.625.000,00	0,00	0,00	0,00	13.625.000,00	80,15	3.375.000,00
4.12.4.12.01.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.157.542.000,00	8.892.463.853,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	8.899.213.853,00	97,18	258.328.147,00
4.12.4.12.01.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.149.542.000,00	8.892.463.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892.463.853,00	97,19	257.078.147,00
4.12.4.12.01.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.000.000,00	0,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	84,38	1.250.000,00
4.12.4.12.01.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	484.927.780,00	0,00	304.698.000,00	0,00	0,00	0,00	304.698.000,00	62,83	180.229.780,00
4.12.4.12.01.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000,00	0,00	136.750.000,00	0,00	0,00	0,00	136.750.000,00	68,38	63.250.000,00
4.12.4.12.01.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
4.12.4.12.01.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	264.927.780,00	0,00	167.948.000,00	0,00	0,00	0,00	167.948.000,00	63,39	96.979.780,00
4.12.4.12.01.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	947.781.750,00	0,00	563.858.609,00	0,00	0,00	0,00	563.858.609,00	59,49	383.923.141,00
4.12.4.12.01.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	350.000.000,00	0,00	322.875.200,00	0,00	0,00	0,00	322.875.200,00	92,25	27.124.800,00
4.12.4.12.01.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.000.000,00	0,00	41.780.000,00	0,00	0,00	0,00	41.780.000,00	55,71	33.220.000,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI							SISA ANGGARAN
			OPERASI			MODAL	BTT	TOTAL	%	
			PEGAWAI	BARANG & JASA	LAINNYA					
4.12.4.12.01.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	0,00	21.362.500,00	0,00	0,00	0,00	21.362.500,00	42,73	28.637.500,00
4.12.4.12.01.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	422.781.750,00	0,00	153.226.309,00	0,00	0,00	0,00	153.226.309,00	36,24	269.555.441,00
4.12.4.12.01.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000,00	0,00	24.614.600,00	0,00	0,00	0,00	24.614.600,00	49,23	25.385.400,00
4.12.4.12.01.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	510.218.250,00	0,00	0,00	0,00	292.040.000,00	0,00	292.040.000,00	57,24	218.178.250,00
4.12.4.12.01.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	510.218.250,00	0,00	0,00	0,00	292.040.000,00	0,00	292.040.000,00	57,24	218.178.250,00
4.12.4.12.01.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514.598.960,00	0,00	507.017.960,00	0,00	0,00	0,00	507.017.960,00	98,53	7.581.000,00
4.12.4.12.01.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	514.598.960,00	0,00	507.017.960,00	0,00	0,00	0,00	507.017.960,00	98,53	7.581.000,00
4.12.4.12.01.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	652.000.000,00	0,00	511.541.885,00	0,00	0,00	0,00	511.541.885,00	78,46	140.458.115,00
4.12.4.12.01.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	377.000.000,00	0,00	309.959.885,00	0,00	0,00	0,00	309.959.885,00	82,22	67.040.115,00
4.12.4.12.01.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00	0,00	37.340.000,00	0,00	0,00	0,00	37.340.000,00	49,79	37.660.000,00
4.12.4.12.01.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	0,00	164.242.000,00	0,00	0,00	0,00	164.242.000,00	82,12	35.758.000,00
4.12.4.12.01.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.290.812.860,00	0,00	1.663.360.738,00	0,00	0,00	0,00	1.663.360.738,00	72,61	627.452.122,00
4.12.4.12.01.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.290.812.860,00	0,00	1.663.360.738,00	0,00	0,00	0,00	1.663.360.738,00	72,61	627.452.122,00
4.12.4.12.01.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.290.812.860,00	0,00	1.663.360.738,00	0,00	0,00	0,00	1.663.360.738,00	72,61	627.452.122,00
4.12.4.12.01.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	84.282.426.000,00	0,00	797.347.500,00	82.421.766.000,00	0,00	0,00	83.219.113.500,00	98,74	1.063.312.500,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI							SISA ANGGARAN
			OPERASI			MODAL	BTT	TOTAL	%	
			PEGAWAI	BARANG & JASA	LAINNYA					
4.12.4.12.01.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	84.282.426.000,00	0,00	797.347.500,00	82.421.766.000,00	0,00	0,00	83.219.113.500,00	98,74	1.063.312.500,00
4.12.4.12.01.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	82.748.270.000,00	0,00	0,00	82.421.766.000,00	0,00	0,00	82.421.766.000,00	99,61	326.504.000,00
4.12.4.12.01.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.500.000.000,00	0,00	797.347.500,00	0,00	0,00	0,00	797.347.500,00	53,16	702.652.500,00
4.12.4.12.01.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	34.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.156.000,00
4.12.4.12.01.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.595.411.700,00	0,00	554.324.500,00	7.330.000.000,00	0,00	0,00	7.884.324.500,00	91,73	711.087.200,00
4.12.4.12.01.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.595.411.700,00	0,00	554.324.500,00	7.330.000.000,00	0,00	0,00	7.884.324.500,00	91,73	711.087.200,00
4.12.4.12.01.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	7.850.411.700,00	0,00	0,00	7.330.000.000,00	0,00	0,00	7.330.000.000,00	93,37	520.411.700,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI							SISA ANGGARAN
			OPERASI			MODAL	BTT	TOTAL	%	
			PEGAWAI	BARANG & JASA	LAINNYA					
4.12 . 4.12.01.01 . 04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	745.000.000,00	0,00	554.324.500,00	0,00	0,00	0,00	554.324.500,00	74,41	190.675.500,00
4.12 . 4.12.01.01 . 05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.000.000.000,00	0,00	788.962.000,00	0,00	0,00	0,00	788.962.000,00	78,90	211.038.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.000.000.000,00	0,00	788.962.000,00	0,00	0,00	0,00	788.962.000,00	78,90	211.038.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.000.000.000,00	0,00	788.962.000,00	0,00	0,00	0,00	788.962.000,00	78,90	211.038.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.337.400.000,00	0,00	2.266.420.500,00	0,00	0,00	0,00	2.266.420.500,00	67,91	1.070.979.500,00
4.12 . 4.12.01.01 . 06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.337.400.000,00	0,00	2.266.420.500,00	0,00	0,00	0,00	2.266.420.500,00	67,91	1.070.979.500,00
4.12 . 4.12.01.01 . 06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	845.200.000,00	0,00	569.588.000,00	0,00	0,00	0,00	569.588.000,00	67,39	275.612.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	537.200.000,00	0,00	496.832.500,00	0,00	0,00	0,00	496.832.500,00	92,49	40.367.500,00
4.12 . 4.12.01.01 . 06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.955.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	61,38	755.000.000,00
Jumlah		111.790.119.300,00	8.892.463.853,00	7.977.906.692,00	89.751.766.000,00	292.040.000,00	0,00	106.914.176.545,00	95,64	4.875.942.755,00